

DR. Muhlis Ruslan, SE., M.Si

MANAJEMEN STRATEGI

(Studi Ekowisata Pulau Barrang Lompo Kota Makassar)



FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR



MANAJEMEN STRATEGI
(Studi Ekowisata Pulau Barrang Lompo Kota Makassar)

Penulis : Dr.Muhlis Ruslan, SE.,M.Si
Editor : Dr.Mas'ud Muhammadiyah
Dr.Hasanuddin Remmang, SE.,M.Si
Desain Cover : Jufriadi, ST.,M.SP

STRATEGI



Motivasi.....

Orang bijak adalah orang yang selalu belajar dari kegagalannya.

Orang yang menyukai tantangan, adalah orang yang mampu memberi ruang pada impian untuk menjadi kenyataan. FIGHT

Muhlis Ruslan.
muhlisruslan@universitasbosowa.ac.id

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kami ucapkan kepada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan atas Bantuan Dana dan Pembinaan Dalam Penelitian Stranas ini.

SAMBUTAN KETUA LPPM UNIVERSITAS BOSOWA

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT., atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga buku ini yang berjudul “ Manajemen Strategi (Studi Ekowisata Pulau Barrang Lompo Kota Makassar). Buku ini memberikan pemahaman suatu teori tentang Strategi Pembangunan Ekonomi dan Kepariwisataan dan Pemberdayaan Masyarakat serta perencanaan pengembangan kawasan Pulau Barrang Lompo.

Sebagai Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Bosowa senantiasa mendorong para dosen untuk melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan selanjutnya membuat buku dan karya ilmiah lainnya

Tentu saja kehadiran buku ini tidak terlepas dari dorongan Rektor Universitas Bosowa yang senantiasa memberi motivasi kepada kami untuk mensosialisasi kepada seluruh dosen dalam membuat karya ilmiah seperti buku, jurnal, prosiding dan lain-lain dalam bentuk ilmiah.

Terima kasih kami ucapkan kepada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan atas bantuan dana dan pembinaan selama ini.

Makassar, 2019
Ketua LPPM Universitas Bosowa

Dr.Haeruddin Saleh, SE.,M.Si

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas taufiq dan hidayah-Nya, sehingga buku ini dapat diselesaikan. Kehadiran buku ini merupakan wujud dari penelitian Stranas (Penelitian Terapan) yang penulis lakukan pada wilayah Pulau Barrang Lompo Kecamatan Sangkarrang Kota Makassar dan diperkuat dengan telaah pustaka.

Buku ini membahas tentang pengembangan studi tata kelola dari sisi teori pengembangan ilmu manajemen strategi berdasarkan perspektif fisik, ekonomi dan sosiokultural sebagai aspek penting dalam penyelesaian penanganan objek wisata dan secara khusus terkait dengan penanganan kawasan strategis daya tarik wisata, yakni pengembangan kawasan pulau Barrang Lompo dalam hal ini perencanaan ruang terbuka publik/hijau, perencanaan sarana fisik persampahan dan perencanaan titik perletakan wc dan kamar mandi komunal.

Penulis menyadari bahwa tentu saja masih mengandung keterbatasan dan kekurangan di dalamnya. Oleh sebab itu saran, kritik, dan masukan yang sifatnya membangun sangat diharapkan. Untuk itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Makassar, 2019

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENERBIT	ii
HALAMAN MOTIVASI	iii
SAMBUTAN KETUA LPPM UNIBOS	iv
KATA PENGANTAR PENULIS	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I. PENDAHULUAN	1
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1. Strategi Pembangunan Ekonomi dan Kepariwisatawan	9
2.2. Kepariwisatawan	18
2.3. Pemberdayaan Masyarakat	30
2.4. Pembangunan Pariwisata dan Pembangunan Ekonomi	34
BAB III. GAMBARAN PULAU BARRANG LOMPO	51

BAB IV. PENGEMBANGAN WISATA PULAU BARRANG LOMPO 58

4.1. Kondisi Sosial Budaya Masyarakat Pulau Barrang

Lompo 58

4.2. Kondisi Ekonomi Masyarakat Pulau Barrang

Lompo 62

BAB V. IMPLEMENTASI PENGEMBANGAN WISATA

PULAU BARRANG LOMPO 72

5.1. Pengembangan Wisata Pulau Barrang Lompo 72

5.2. Isu Strategis dan Konsep Penanganan Obyek Wisata

Pulau Barrang Lompo 76

5.3. Kebijakan Pemda 77

5.4. Implementasi Strategi Pengembangan 84

DAFTAR PUSTAKA 105

BAB I

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang memiliki letak geografis yang sangat strategis, karena berada di antara dua benua (Asia dan Eropa) serta dua samudra (Pasifik dan Hindia), sebuah posisi yang strategis dalam jalur pelayaran perdagangan antar benua. Pembangunan ekonomi yang dilaksanakan bangsa Indonesia meliputi seluruh aspek perekonomian masyarakat, baik kehidupan masyarakat pedesaan maupun masyarakat perkotaan, dengan tujuan utama memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup seluruh rakyat Indonesia. Untuk itu ilmu ekonomi pembangunan lebih banyak dipelajari pada negara-negara berpenghasilan rendah atau biasa disebut sebagai negara sedang berkembang (*developing country*). Sebuah negara sedang berkembang adalah bangsa dengan rendah standar hidupnya, Shindu P.(2018). Hal tersebut ditunjukkan dengan basis industri yang terbelakang, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) relative rendah dibandingkan terhadap negara-negara lain, Arthur Sullivan. et.al. (2003). Pembangunan ekonomi tersebut dilaksanakan dengan menitikberatkan pada upaya pertumbuhan sektor ekonomi dengan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki, baik potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusianya.

Undang-Undang RI No. 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, menjelaskan bahwa wisata adalah suatu kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh individu atau kelompok mengunjungi suatu tempat dan bertujuan untuk rekreasi, pengembangan pribadi, atau untuk mempelajari keunikan daya tarik suatu tempat wisata yang dikunjungi dalam waktu sementara, pariwisata adalah kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai layanan fasilitas yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah, daerah tujuan wisata dapat disebut juga dengan destinasi.

Dari definisi di atas, terdapat berbagai konsep pembangunan pariwisata yang dapat dirumuskan sebagai prinsip dasar dari setiap elemen pembangunan pariwisata berkelanjutan. Untuk itu diperlukan komponen yang perlu diperhatikan, sebagaimana pendapat Prasiasa (2011) menyebutkan bahwa komponen desa wisata mengacu pada; 1) Partisipasi masyarakat lokal 2) Sistem norma setempat 3) Sistem adat setempat, dan 4) Budaya setempat. Selanjutnya Fissi Novitasari (2015) dalam tulisannya menyebutkan bahwa tujuan pariwisata adalah untuk menggunakan waktu senggang, baik digunakan untuk rekreasi (berlibur), keperluan kesehatan, pelajaran dan pengetahuan, serta menjalankan ibadah maupun olah raga. Oleh sebab itu kawasan merupakan bagaian yang perlu dimanfaatkan, sebagaimana Adisasmita R.(2013) menjelaskan bahwa kawasan pembangunan yang memiliki fungsi tertentu, memiliki sasaran dan tujuan pembangunan tertentu dan terarah, dan dalam implementasinya akan melibatkan interaksi antara

sektor utama dengan sektor-sektor penunjang dalam bentuk interkoneksi dan interdependensi yang bersifat lebih intensif dan responsif, sehingga memberikan dampak multiplier pembangunan yang lebih luas bagi pertumbuhan wilayah yang dirasakan manfaatnya bagi kesejahteraan ekonomi dan sosial secara luas pula.

Sektor pariwisata menjadi posisi strategis oleh karena didukung oleh potensi alam dan beragam budaya namun terbatas dalam pengembangan sumber daya. Oleh sebab itu pilihan pada sektor pariwisata dimaksudkan sebagai pembuka sektor lain. Sebagai contoh daya tarik wisata dalam penelitian Purnama Suzanti (2014) mengemukakan bahwa di Pacu Jawi merupakan *pamenan anak nagari* (permainan menghibur dan menyampaikan nilai-nilai luhur oleh anak *nagari*) selepas panen padi, berupa memacu sepasang sapi di sawah yang berair dan berlumpur. Kegiatan ini sudah menjadi tradisi masyarakat yang bertahan di empat kecamatan yaitu kecamatan Sungai Tarab, Pariangan, Lima Kaum, dan Rambatan di kabupaten Tanah Datar. Tradisi ini sejak tahun 2009 memenangkan beberapa kontes foto skala nasional dan internasional sehingga dikunjungi wisatawan. Industri pariwisata sudah cukup tepat jika kita menggolongkan pariwisata sebagai sebuah industri, karena pariwisata menghasilkan, memasarkan, dan menyediakan produk-produk. Promosi destinasi apapun jenis daya tarik dari sebuah destinasi, tempat itu harus dipromosikan. Tempat yang memiliki potensi pariwisata harus dipublikasikan, karena jika orang tidak mengetahui

keberadaan suatu destinasi, maka mereka tidak akan mengunjunginya. Oleh sebab itu pola tata ruang perlu didesain sedemikian rupa dalam upaya menarik pengunjung, sehingga diperlukan kontribusi setiap waktu dari para pengunjung demi kemajuan pariwisata.

Proyeksi Indonesia menjadi negara maju dan kuat di abad 21 merupakan sebuah capaian atas *Sustainable Growth and Development Program* yang dicanangkan pemerintah. Perekonomian Indonesia di tahun 2045 diprediksi akan menjadi kuat, berkeadilan dan ramah lingkungan. Selain itu demokrasi menjadi lebih matang dan stabil dengan terbangunnya peradaban unggul, maju, produktif, inovatif dan berkelanjutan, serta harus utuh dan berjangka panjang. Pencapaian *sustainable growth and development* harus dimulai dari pemahaman dan pilihan strategi. Setidaknya terdapat empat langkah utama berkesinambungan dan berkelanjutan yang ditempuh yakni, *pro-growth, pro-poor, pro-job, dan pro-environment*. Oleh karenanya diperlukan *global economic balance*. Pembangunan pariwisata merupakan strategi penting untuk upaya tambahan berupa peningkatan keterampilan bagi para pekerja, diikuti dengan upaya perluasan lapangan kerja di sektor-sektor yang dapat menyerap tenaga kerja tambahan. salah satu strategi yang dikembangkan untuk mendongkrak perekonomian dan strategi model pengembangannya adalah sistem ekonomi. Setiap orang juga diberikan kebebasan memiliki barang dan jasa. Hal ini berarti wilayah ini terbuka dan berinteraksi serta menjalin kerja sama dengan daerah lain. Edi Purwo

Saputro, dkk (2007) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa sektor pariwisata menjadi posisi strategis oleh karena didukung oleh potensi alam dan beragam budaya namun terbatas dalam diversifikasi pengembangan sumber daya. Pilihan pada sektor pariwisata dimaksudkan sebagai pembuka sektor lain. Oleh karena adanya keterbukaan ini mendorong terjadinya dorongan untuk meningkatkan mutu produk agar mampu bersaing. Hal ini tidak hanya berlaku bagi produk-produk yang dihasilkan, namun juga pada tenaga kerja. Tenaga kerja dituntut untuk selalu meningkatkan kualitas diri. Sistem ekonomi ini juga memberikan dampak buruk, apabila tidak disertai dengan pengaturan hukum yang baik dan pengawasan pemerintah.



Fotret Kawasan Dermaga Pulau Barrang Lompo

Dari latar belakang yang demikian, wilayah tersebut akan maju mencari strategi baru untuk memecahkan masalah lainnya dan pada gilirannya daerah tersebut mulai membentuk lembaga untuk mengkaji dan

menilai semua perencanaan wilayah yang mengarah pada tujuan yang akan dicapai di masa datang. Lembaga tersebut kemudian menemukan masalah yang mendasari kondisi ini, yaitu dinamika perubahan ruang ekonomi dan ketidaksamaan dalam taraf kesejahteraan. Oleh karena itu, kemudian diterapkan pembangunan pribumi yang didasarkan pada potensi yang dimiliki oleh wilayah-wilayah setempat. Ini berarti, potensi-potensi yang ada menjadi dasar prioritas pengembangan. Strategi kewilayahan inilah yang kemudian banyak dikembangkan oleh negara-negara maju.

Wilayah Pulau Barrang Lompo masih berada pada kategori permukiman yang belum maju berdasarkan indikator; ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi standar pelayanan. Indikasi ini ditandai dengan keberadaan kantung-kantung permukiman yang berlokasi pada daerah sempadan pantai yang seharusnya diperuntukkan untuk kebutuhan ruang terbuka atau pada lahan-lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Fenomena permukiman kumuh pada daerah kepulauan berdasarkan lokasinya cenderung berkembang; pada pusat kegiatan ekonomi, sempadan pantai, dan pada fungsi-fungsi kegiatan strategis lainnya.

Pulau Barrang Lompo Kecamatan Sangkarrang Kota Makassar menjadi salah satu daerah tujuan wisata, akan tetapi potensi daya tarik wisata belum mampu mempertahankan posisi strategisnya dalam menarik wisatawan, hal ini terlihat dari data kunjungan, yang datang berkunjung

hanya mahasiswa yang melaksanakan praktek lapang dan pejabat-pejabat pemerintah berkunjung dalam sosialisasi pemerintahan. Untuk itu, dalam menarik potensi pasar wisatawan diperlukan manajemen strategi agar wisatawan terdorong dan termotivasi untuk melakukan perjalanan wisata.

Pembangunan pariwisata berbasis masyarakat menjadihal yang penting oleh karena seluruh aktivitas masyarakat, khususnya aktivitas ekonomi dapat mempengaruhi pola hidup dan kesejahteraan masyarakat. Dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat, masyarakat setempat tentu saja memperoleh ruang atau kesempatan untuk berusaha yang pada gilirannya dapat memperoleh pendapatan.

Berkembangnya daerah Pulau Barrang Lompo akan mengubah strategi pembangunan dengan memulai mengembangkan aktivitas produksi barang-barang sekunder dan tersier dan strategi diversifikasi produk yang dapat mengangkat citra ekonomi masyarakat Pulau Barrang Lompo oleh karena dengan perkembangan industri ke depan di Pulau Barrang Lompo akan lebih bisa menarik wilayah lain untuk turut berkembang. Artinya, dengan kegiatan industri tersebut lebih banyak wilayah lain yang ikut terlibat, misalnya wilayah sumber bahan mentah atau bahan baku, wilayah pasar, serta lokasi industri itu sendiri. Dengan model manajemen strategi pengembangan yang demikian, akan memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan masyarakat.



STRATEGI

Sisi Timur Kawasan Pesisir Pulau Barrang Lompo

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Strategi Pembangunan Ekonomi dan Kepariwisata

Menurut Undang Undang No. 10/2009 tentang Kepariwisata, yang dimaksud dengan pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Dalam hal ini industri pariwisata telah berlomba-lomba menciptakan suatu produk pariwisata yang lebih bervariasi menyangkut pelestarian dari daya tarik wisata itu sendiri sesuai dengan tujuan pengembangan pariwisata yaitu untuk mengenalkan keindahan alam, buatan manusia, budaya dan adat istiadat yang beraneka ragam.

Secara mikro, aspek ekonomi dalam kepariwisataan dapat dijelaskan bahwa dengan adanya perkembangan pariwisata akan memberi dampak positif bagi: pendapatan masyarakat sekitar daerah tujuan obyek wisata karena dengan meningkatnya arus wisatawan, masyarakat disekitar obyek wisata dapat memanfaatkan untuk membuka usaha yang kira-kira dibutuhkan oleh wisatawan. Dampak positif itu dirasakan, antara lain oleh pengusaha akomodasi, rumah makan, sampai dengan jasa-jasa lain

seperti penyewaan peralatan untuk olah raga air, mobil, mesase, dan souvenir; pendapatan daerah setempat, dengan adanya perolehan masukan kas daerah dari pungutan pajak dan retribusi; meningkatnya permintaan hasil daerah setempat dan meningkatnya permintaan barang-barang kerajinan, *souvenir*, *handicraft*, serta barang-barang yang khas dari suatu daerah.

Terdapat strategi pembangunan berkelanjutan yang dapat diterapkan. Dari berbagai konsep yang ada maka dapat dirumuskan prinsip dasar dari setiap elemen pembangunan berkelanjutan. Dalam hal ini ada empat komponen yang perlu diperhatikan yaitu pemerataan, partisipasi, keanekaragaman, integrasi, dan perspektif jangka panjang (Askar Jaya, 2004): (1) Pembangunan yang menjamin pemerataan dan keadilan sosial. Pembangunan yang berorientasi pemerataan dan keadilan sosial harus dilandasi hal-hal seperti ; meratanya distribusi sumber lahan dan faktor produksi, meratanya peran dan kesempatan perempuan, meratanya ekonomi yang dicapai dengan keseimbangan distribusi kesejahteraan, Namun pemerataan bukanlah hal yang secara langsung dapat dicapai. Pemerataan adalah konsep yang relatif dan tidak secara langsung dapat diukur. Dimensi etika pembangunan berkelanjutan adalah hal yang menyeluruh, kesenjangan pendapatan negara kaya dan miskin semakin melebar, walaupun pemerataan dibanyak negara sudah meningkat. Aspek etika lainnya yang perlu menjadi perhatian pembangunan berkelanjutan

adalah prospek generasi masa datang yang tidak dapat dikompromikan dengan aktivitas generasi masa kini. Ini berarti pembangunan generasi masa kini perlu mempertimbangkan generasi masa datang dalam memenuhi kebutuhannya, (2) Pembangunan yang menghargai keanekaragaman. Memelihara keanekaragaman hayati adalah prasyarat untuk memastikan bahwa sumber daya alam selalu tersedia secara berkelanjutan untuk masa kini dan masa datang. Keanekaragaman hayati juga merupakan dasar bagi keseimbangan ekosistem. Pemeliharaan keanekaragaman budaya akan mendorong perlakuan yang merata terhadap setiap orang dan membuat pengetahuan terhadap tradisi berbagai masyarakat dapat lebih dimengerti, (3) Pembangunan yang menggunakan pendekatan integratif. Pembangunan berkelanjutan mengutamakan keterkaitan antara manusia dengan alam. Manusia mempengaruhi alam dengan cara yang bermanfaat atau merusak. Hanya dengan memanfaatkan pengertian tentang kompleksnya keterkaitan antara sistem alam dan sistem sosial. Dengan menggunakan pengertian ini maka pelaksanaan pembangunan yang lebih integratif merupakan konsep pelaksanaan pembangunan yang dapat dimungkinkan. Hal ini merupakan tantangan utama dalam kelembagaan dan (4) Pembangunan yang meminta perspektif jangka panjang. Masyarakat cenderung menilai masa kini lebih dari masa depan, implikasi pembangunan berkelanjutan merupakan tantangan yang melandasi penilaian ini. Pembangunan

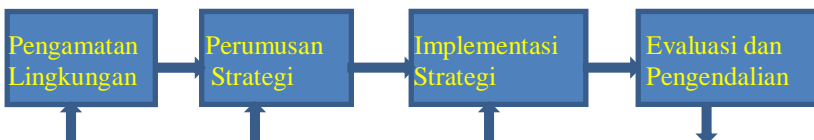
berkelanjutan mensyaratkan dilaksanakan penilaian yang berbeda dengan asumsi normal dalam prosedur *discounting*. Persepsi jangka panjang adalah perspektif pembangunan yang berkelanjutan. Hingga saat ini kerangka jangka pendek mendominasi pemikiran para pengambil keputusan ekonomi, oleh karena itu perlu dipertimbangkan.

Manajemen strategis adalah seni dan ilmu menyusun, menerapkan serta mengevaluasi keputusan-keputusan yang telah diambil. Sofjan A. (2016) menjelaskan bahwa manajemen strategi merupakan proses penetapan misi, visi dan tujuan serta pengembangan kebijakan dan program pelaksanaan untuk mencapainya. Fred R. David (2009) mengemukakan bahwa manajemen strategis sebagai seni dan pengetahuan dalam merumuskan, mengimplementasikan, serta mengevaluasi keputusan-keputusan lintas fungsional yang memungkinkan sebuah organisasi mencapai tujuannya. Lebih lanjut dijelaskan bahwa manajemen strategi berfokus pada usaha untuk mengintegrasikan manajemen, pemasaran keuangan/akuntansi, produksi/operasi penelitian dan pengembangan serta sistem informasi. Manajemen strategis berfokus pada proses penetapan tujuan organisasi, pengembangan kebijakan dan perencanaan untuk mencapai sasaran, serta mengalokasikan sumber daya untuk menerapkan kebijakan dan merencanakan pencapaian tujuan organisasi. Manajemen strategis mengkombinasikan aktivitas-aktivitas dari berbagai bagian fungsional suatu bisnis untuk mencapai tujuan

organisasi. Ada tiga tahapan dalam manajemen strategis, yaitu perumusan strategi, pelaksanaan strategi, dan evaluasi strategi (David, 2004). Strategi merupakan sejumlah keputusan dan aksi yang ditujukan untuk mencapai tujuan dan menyesuaikan sumber daya organisasi dengan peluang dan tantangan yang dihadapi dalam lingkungan industrinya (Coulter, 2002). Dengan demikian beberapa ciri strategi yang utama adalah:

1. Merupakan aktivitas yang menunjukkan apa yang diinginkan dan bagaimana mengimplementasikannya.
2. Mempertimbangkan semua kekuatan internal, serta memperhatikan peluang dan tantangan.

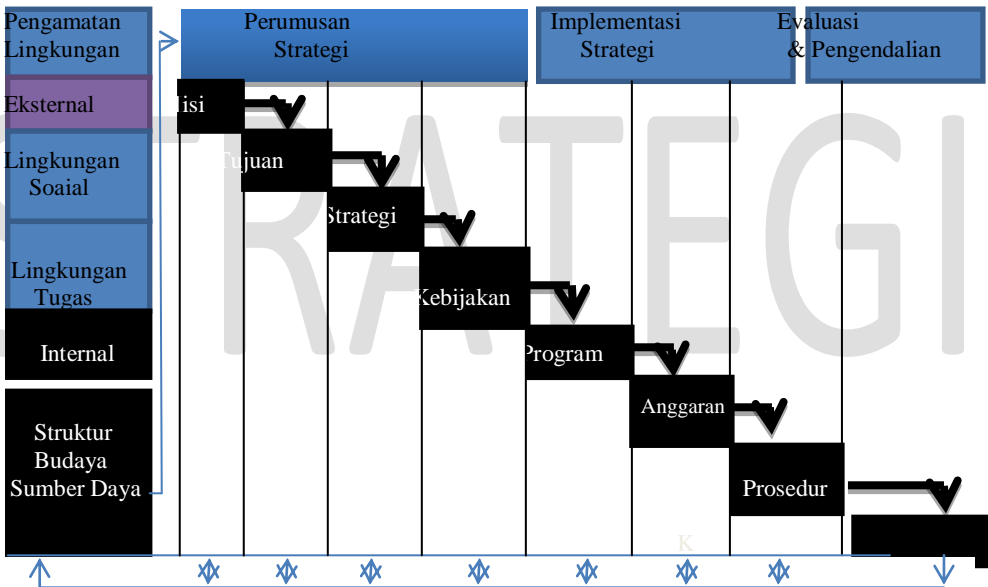
J. David (2003) menjelaskan bahwa manajemen strategi meliputi pengamatan lingkungan, perumusan strategi (perencanaan strategi atau perencanaan jangka panjang), implementasi strategi, dan evaluasi serta pengendalian. Hal tersebut digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1. Elemen Dasar Proses Manajemen strategi, J.David

Pengamatan lingkungan menganalisis atau memperhatikan lingkungan eksternal yang terdiri dari variabel-variabel kesempatan dan ancaman yang berada di luar dan lingkungan internal yang terdiri dari variabel-variabel kekuatan dan kelemahan, antara lain budaya (pola keyakinan, pengharapan, nilai) dan sumber daya (asset yang merupakan bahan baku bagi produksi barang dan jasa). Perumusan strategi adalah pengembangan rencana jangka panjang untuk manajemen efektif dari kesempatan dan ancaman lingkungan di lihat dari kekuatan dan kelemahan (tujuan yang dapat dicapai, pengembangan strategi, dan penetapan pedoman kebijakan). Implementasi strategi adalah proses dimana manajemen mewujudkan strategi dan kebijakan dalam tindakan melalui pengembangan program, anggaran dan prosedur. Evaluasi dan pengendalian adalah proses yang melaluinya seluruh aktivitas dengan menggunakan informasi hasil kinerja untuk melakukan tindakan perbaikan dan memecahkan masalah. Walaupun evaluasi dan pengendalian merupakan elemen akhir yang utama dari manajemen strategis, elemen itu juga dapat menunjukkan secara tepat kelemahan-kelemahan dalam implemtasi strategi sebelumnya dan mendorong proses keseluruhan untuk dimulai kembali.

Agar evaluasi dan pengendalian efektif diperlukan umpan balik yang jelas, tepat dan tidak bias dari orang-orang. Gambar 2 dibawah ini menunjukkan bagaimana umpan balik dalam bentuk data kinerja dan laporan aktivitas dijalankan melauai seluruh proses manajemen. Lebih jelasnya model manajemen strategi digambarkan sebagai berikut :



Skema 2. Model Umpan Balik Manajemen strategi, J.David

Strategi pada prinsipnya berkaitan dengan persoalan kebijakan pelaksanaan, penentuan tujuan yang hendak dicapai, dan penentuan cara-cara atau metode penggunaan sarana-prasarana. Strategi selalu berkaitan dengan

sarana, dan cara. Oleh karena itu, strategi juga harus didukung oleh kemampuan untuk mengantisipasi kesempatan yang ada. Dalam melaksanakan fungsi dan peranannya dalam pengembangan pariwisata daerah, pemerintah daerah harus melakukan berbagai upaya dalam pengembangan sarana dan prasarana pariwisata. Strategi perkembangan pariwisata yang menunjang pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal Pendit, (1990) sebagai berikut:

1. Perlu ditetapkan beberapa peraturan yang berpihak pada peningkatan mutu pelayanan pariwisata dan kelestarian lingkungan wisata, bukan berpihak pada kepentingan pihak-pihak tertentu,
2. Pengelola pariwisata harus melibatkan masyarakat setempat. Hal ini merupakan hal penting karena sebagai hal pengalaman pada beberapa daerah tujuan wisata, apabila tidak melibatkan masyarakat setempat, akibatnya tidak ada sumbangsih ekonomi yang diperoleh masyarakat sekitar,
3. Kegiatan promosi harus beraneka ragam, selain dengan mencanangkan cara kampanye dan program *Visit Indonesia Year* seperti yang sudah dilakukan sebelumnya. Kegiatan promosi juga perlu dilakukan dengan membentuk system informasi yang handal dan membangun kerjasama yang baik dengan pusat

informasi pada negara-negara lain terutama pada negara yang berpotensi,

4. Perlu menentukan daerah tujuan wisata yang memiliki keunikan dibanding dengan daerah tujuan wisata lain, terutama yang bersifat tradisional dan alami,
5. Pemerintah pusat membangun kerjasama dengan kalangan swasta dan pemerintah daerah setempat, dengan system terbuka, jujur dan adil. Kerjasama ini penting karena untuk mempelancar pengelolah secara professional dengan mutu pelayanan yang memadai,
6. Perlu dilakukan pemerataan arus wisatawan bagi semua daerah tujuan wisata yang ada diseluruh Indonesia,
7. Mengajak masyarakat sekitar daerah tujuan wisata agar menyadari peran, fungsi dan manfaat pariwisata serta merangsang mereka untuk memanfaatkan peluang-peluang yang tercipta bagi berbagai kegiatan yang dapat menguntungkan secara ekonomi,
8. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan perlu dipersiapkan secara baik untuk menunjang kelancaran pariwisata. misalnya dengan pengadaan perbaikan jalan, telepon, internet dan pusat pembelanjaan disekitar lokasi daerah wisata.

Oleh sebab itu jenis pengelolaan kawasan menurut Adisasmita R.(2013) seperti jenis penggunaannya adalah kawasan pariwisata yang

diperuntukkan bagi kegiatan pariwisata memiliki kriteria kawasan yang mempunyai; a) keindahan alam dan keindahan panorama, b) masyarakat dengan kebudayaan bernilai tinggi dan diminati oleh wisatawan, dan c) bangunan peninggalan budaya dan tau mempunyai nilai sejarah yang tinggi. Selanjutnya dijelaskan bahwa kawasan adalah bentangan permukaan (alam) dengan batas-batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional. Wisata berarti perjalanan atau bepergian, jadi kawasan wisata adalah bentangan permukaan yang dikunjungi atau didatangi oleh banyak orang (wisatawan) karena kawasan tersebut memiliki objek wisata yang menarik. Objek wisata adalah suatu tempat yang menjadi kunjungan wisatawan karena mempunyai sumberdaya Tarik, baik alamiah maupun buatan manusia.

2.2. Kepariwisataan

Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha (Pertiwi, 2011). Koen Meyers (2009), pariwisata adalah aktivitas perjalanan yang dilakukan oleh semntara waktu dari tempat tinggal semula ke daerah tujuan dengan alasan bukan untuk menetap atau mencari nafkah melainkan hanya untuk memenuhi rasa ingin tahu, menghabiskan waktu senggang atau libur serta tujuan-tujuan lainnya.

Oda I.B Haryanto (2017) dalam penelitiannya memfokuskan bahwa untuk menemukannya dan mengimplementasikan kata-kata bijak kearifan lokal Sunda dalam membangun karakter sadar Wisata pada masyarakat di destinasi. Hasil penelitiannya secara khusus dapat menjadi acuan untuk daerah destinasi di Jawa Barat dalam membangun karakter sadar wisata masyarakat di destinasi melalui kerarifan lokal Sunda, dan pada umumnya untuk destinasi di wilayah Indonesia.

Berdasarkan penelitian tersebut, peneliti menyadari bahwa masyarakat di Pulau Barrang Lompo Kota Makassar dalam survey awal memberi gambaran bahwa daerah tersebut perlu dilakukan sosialisasi dan penanganan tentang sadar wisata dan perlu menumbuhkembangkan kearifan lokal sebagai potensi yang perlu dipertahankan. Gamal (2002) pariwisata didefinisikan sebagai bentuk suatu proses kepergian sementara dari seorang, lebih menuju ke tempat lain di luar tempat tinggalnya. Dorongan kepergiannya adalah karena berbagai kepentingan ekonomi, sosial, budaya, politik, agama, kesehatan maupun kepentingan lain. Produk Pariwisata dibanding dengan jenis-jenis produk barang dan jasa lainnya memiliki ciri-ciri berbeda dan untuk memahami bentuk serta wujud dari produk pariwisata, maka berikut ini pengertian produk pariwisata yang dikemukakan oleh : Burkat dan Medlik, yaitu produk pariwisata dapat merupakan suatu susunan produk yang terpadu, yang terdiri dari objek dan daya tarik wisata, transportasi, akomodasi dan hiburan, dimana tiap unsur

produk pariwisata dipersiapkan oleh masing-masing perusahaan dan ditawarkan secara terpisah kepada konsumen (wisatawan/tourist). *Medlik dan Middleton*, yaitu produk pariwisata terdiri dari bermacam-macam unsur yang merupakan suatu paket yang satu sama lainnya tidak terpisahkan serta memenuhi kebutuhan wisatawan sejak meninggalkan tempat tinggalnya sampai ketempat tujuannya dan kembali lagi ketempat asalnya.

Berdasarkan kedua pengertian ini, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 (tiga) unsur yang membentuk suatu produk pariwisata, yaitu :

1. Daya Tarik dari Destinasi
2. Fasilitas dari Destinasi
3. Kemudahan dari Destinasi

Selanjutnya ketiga unsur tersebut menyatu dan menghasilkan citra terhadap suatu destinasi, apakah baik atau buruk. Berikut ini terdapat sejumlah 6 (enam) unsur produk pariwisata yang membentuk suatu paket pariwisata terpadu yang diuraikan berdasarkan kebutuhan wisatawan, antara lain:

1. Objek dan Daya Tarik Wisata;
2. Jasa Travel Agent & Tour Operator;
3. Jasa Perusahaan Angkutan;
4. Jasa Pelayanan Akomodasi, Restoran, Rekreasi dan Hiburan;
5. Jasa Souvenir (Cinderamata);

6. Jasa Perusahaan Pendukung.

Menurut Suswanto (2007:75) pada hakekatnya pengertian produk wisata “adalah keseluruhan pelayanan yang diperoleh dan dirasakan atau dinikmati wisatawan semenjak ia meninggalkan tempat tinggalnya sampai ke daerah tujuan wisata yang dipilihnya dan sampai kembali kerumah dimana ia berangkat semula”. Menurut J. Krippendorf, dalam bukunya *Marketing Et Tourisme* merumuskan pemasaran pariwisata sebagai berikut “*Marketing in tourism to be understood as the systematic and coordinated execution of business policy by tourist undertaking whether private or state owned at local, regional, national and international level to achieve the optimal of satisfaction of the needs of identifiable consumers group and in doing so to achieve an appropriate return*”.

Faulkner (1997) menyebutkan bahwa pariwisata massal memiliki karakteristik yakni:

1. Jumlah wisatawan yang mengikuti perjalanan dalam jumlah besar (group);
2. Pembelian paket wisata dan perjalanan sangat diseragamkan (tidak ada pilihan);
3. Perjalanan diatur segalanya oleh *Travel Agent*;
4. Wisatawan yang mengikuti perjalanan ini relatif tidak berpengalaman;
5. Wisatawan yang mengikuti perjalanan ini tidak canggih;
6. Mengunjungi Daerah Tujuan wisata, hanya untuk bersantai, menikmati pemandangan dan melihat sinar matahari, pasir putih dan pantai putih,
7. Wisatawan di daerah tujuan wisata banyak mengunjungi dan menyaksikan

objek dan daya tarik wisata; (8) jadwal perjalanannya sangat padat.

Purnama Suzanti (2014) dalam penelitiannya di Pacu Jawi merupakan *pameran anak nagari* (permainan menghibur dan menyampaikan nilai-nilai luhur oleh anak *nagari*) selepas panen padi, berupa memacu sepasang sapi di sawah yang berair dan berlumpur. Kegiatan ini sudah menjadi tradisi masyarakat yang bertahan di empat kecamatan yaitu kecamatan Sungai Tarab, Pariangan, Lima Kaum, dan Rambatan di kabupaten Tanah Datar. Tradisi ini sejak tahun 2009 memenangkan beberapa kontes foto skala nasional dan internasional sehingga dikunjungi wisatawan.

Kriteria suatu daerah dapat disebut sebagai kawasan wisata jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Atraksi wisata; yaitu semua yang mencakup alam, budaya dan hasil ciptaan manusia. Atraksi yang dipilih adalah yang paling menarik dan atraktif di desa.
2. Jarak Tempuh; adalah jarak tempuh dari kawasan wisata terutama tempat tinggal wisatawan dan juga jarak tempuh dari ibukota provinsi dan jarak dari ibukota kabupaten.
3. Besaran Desa; menyangkut masalah-masalah jumlah rumah, jumlah penduduk,
4. karakteristik dan luas wilayah desa. Kriteria ini berkaitan dengan daya dukung kepariwisataan pada suatu desa.
5. Sistem Kepercayaan dan kemasyarakatan; merupakan aspek

penting mengingat adanya aturan-aturan yang khusus pada komunitas sebuah desa. Perlu dipertimbangkan adalah agama yang menjadi mayoritas dan sistem kemasyarakatan yang ada.

6. Ketersediaan infrastruktur; meliputi fasilitas dan pelayanan transportasi, fasilitas listrik, air bersih, drainase, telepon dan sebagainya. Masing-masing kriteria digunakan untuk melihat karakteristik utama suatu desa untuk kemudian menentukan apakah suatu desa akan menjadi desa dengan tipe berhenti sejenak, tipe *one day trip* atau tipe tinggal inap. (http://id.wikipedia.org/wiki/Desa_wisata).

Industri pariwisata sudah cukup tepat jika kita menggolongkan pariwisata sebagai sebuah industri, karena pariwisata menghasilkan, memasarkan, dan menyediakan produk-produk. Namun, banyak aktivitas bisnis tergolong dalam industri ini, beberapa di antaranya pada pandangan awal mungkin beroperasi secara bebas dari yang lainnya. Pada kenyataannya, berbagai jenis kegiatan saling bergantung satu sama lain untuk mencapai sukses, dan setiap aktivitas harus di koordinasi dan dilaksanakan secara selaras dengan tujuan menyediakan produk turis yang lengkap.

Promosi destinasi apapun jenis daya tarik dari sebuah destinasi, tempat itu harus dipromosikan. Tempat yang memiliki potensi pariwisata harus dipublikasikan, karena jika orang tidak mengetahui keberaddaan

suatu destinasi, maka mereka tidak akan mengunjunginya. Dalam mempublikasikan suatu destinasi, misalnya dalam bentuk iklan, destinasi tersebut harus dijelaskan serinci mungkin. Tambahkan beberapa foto yang menarik untuk menarik minat orang. Suatu destinasi akan jarang didatangi wisatawan apabila: Tidak ada akomodasi untuk wisatawan tidak dapat dicapai dengan mudah. Fasilitas Fasilitas yang disediakan harus sesuai dengan persyaratan. Persyaratan dasar dari sebuah destinasi wisata adalah akomodasi, makan-minum, cloakrooms. Namun standar dari persyaratan tersebut ditentukan oleh mereka yang menikmatinya (wisatawan). Sumber: module 1 – Tourism and Travel Agent Management (Cambridge International Collage.

Dalam sistem pariwisata, ada banyak aktor yang berperan dalam menggerakkan sistem. Aktor tersebut adalah insan-insan pariwisata yang ada pada berbagai sektor. Secara umum, insan pariwisata dikelompokkan dalam tiga pilar utama, yaitu : (1) masyarakat, (2) swasta, dan (3) pemerintah. Masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat umum yang ada pada destinasi, sebagai pemilik sah dari berbagai sumber daya yang merupakan modal pariwisata seperti kebudayaan. Dimasukkan kedalam kelompok masyarakat ini juga tokoh-tokoh masyarakat, intelektual, LSM, dan media masa. Selanjutnya dalam kelompok swasta adalah asosiasi usaha pariwisata dan para pengusaha, sedangkan kelompok pemerintah adalah pada berbagai wilayah administrasi, mulai dari pemerintah pusat, negara bagian,

provinsi, kabupaten, dan seterusnya. Pitana dan Gayatri, (2005). Selanjutnya Edi Purwo Saputro, dkk (2007) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa sektor pariwisata menjadi posisi strategis oleh karena didukung oleh potensi alam dan beragam budaya namun terbatas dalam diversifikasi pengembangan sumber daya. Pilihan pada sektor pariwisata dimaksudkan sebagai pembuka sektor lain.

Oleh sebab itu diperlukan konsep perencanaan pembangunan pariwisata yang dapat dijadikan tolak ukur bagi kepentingan masyarakat. Hal itu sejalan dengan pendapat Sjahfrizal (2014) menyatakan bahwa perencanaan pembangunan merupakan suatu cara dalam mencapai tujuan pembangunan yang tepat, terarah dan efisien yang disesuaikan dengan kondisi yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Adapun tahapan perencanaan pembangunan ialah sebagai berikut:

1. Tahap Perencanaan adalah tahapan dalam menyusun naskah rancangan pembanguana yang formal menjadi tanggung jawab BAPPENAS ataupun BAPPEDA. Rancangan tersebut kemudian dibahas dalam MUSRENBANG untuk memperoleh tanggapan dari berbagai pihak, tokoh masyarakat ataupun LSM.
2. Tahapan Pelaksanaan Rencana ialah dalam praktiknya.
3. Tahapan Pengendalian (Monitoring) dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana merupakan tahapan yang sangat penting dilaksanakan untuk dapat menjamin agar apa yang telah direncanakan

semula akan dapat dilaksanakan secara baik dilapangan sesuai dengan yang diharapkan.

Sapta Nirwandar, (2006) menyebutkan bahwa Pembangunan kepariwisataan pada dasarnya ditujukan untuk :

- a. Persatuan dan Kesatuan Bangsa. Pariwisata mampu memberikan perasaan bangga dan cinta terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui kegiatan perjalanan wisata yang dilakukan oleh penduduknya ke seluruh penjuru negeri. Sehingga dengan banyaknya warganegara yang melakukan kunjungan wisata di wilayah-wilayah selain tempat tinggalnya akan timbul rasa persaudaraan dan pengertian terhadap sistem dan filosofi kehidupan masyarakat yang dikunjungi sehingga akan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan nasional.
- b. Penghapusan Kemiskinan (*Poverty Alleviation*). Pembangunan pariwisata seharusnya mampu memberikan kesempatan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk berusaha dan bekerja. Kunjungan wisatawan ke suatu daerah seharusnya memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian pariwisata akan mampu memberi andil besar dalam penghapusan kemiskinan di berbagai daerah yang miskin potensi ekonomi lain selain potensi alam dan budaya bagi kepentingan pariwisata.

- c. **Pembangunan Berkesinambungan** (*Sustainable Development*). Dengan sifat kegiatan pariwisata yang menawarkan keindahan alam, kekayaan budaya dan keramahtamahan pelayanan, sedikit sekali sumberdaya yang habis digunakan untuk menyokong kegiatan ini. Bahkan berdasarkan berbagai contoh pengelolaan kepariwisataan yang baik, kondisi lingkungan alam dan masyarakat di suatu destinasi wisata mengalami peningkatan yang berarti sebagai akibat dari pengembangan kepariwisataan di daerahnya.
- d. **Pelestarian Budaya** (*Culture Preservation*). Pembangunan kepariwisataan seharusnya mampu kontribusi nyata dalam upaya-upaya pelestarian budaya suatu negara atau daerah yang meliputi perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya negara atau daerah. UNESCO dan UN-WTO dalam resolusi bersama mereka di tahun 2002 telah menyatakan bahwa kegiatan pariwisata merupakan alat utama pelestarian kebudayaan. Dalam konteks tersebut, sudah selayaknya bagi Indonesia untuk menjadikan pembangunan kepariwisataan sebagai pendorong pelestarian kebudayaan di berbagai daerah.
- e. **Pemenuhan Kebutuhan Hidup dan Hak Azasi Manusia**. Pariwisata pada masa kini telah menjadi kebutuhan dasar kehidupan masyarakat modern. Pada beberapa kelompok masyarakat tertentu kegiatan melakukan perjalanan wisata bahkan telah dikaitkan dengan hak azasi

manusia khususnya melalui pemberian waktu libur yang lebih panjang dan skema paid holidays.

- f. Peningkatan Ekonomi dan Industri. Pengelolaan kepariwisataan yang baik dan berkelanjutan seharusnya mampu memberikan kesempatan bagi tumbuhnya ekonomi di suatu destinasi pariwisata. Penggunaan bahan dan produk lokal dalam proses pelayanan di bidang pariwisata akan juga memberikan kesempatan kepada industri lokal untuk berperan dalam penyediaan barang dan jasa. Syarat utama dari hal tersebut di atas adalah kemampuan usaha pariwisata setempat dalam memberikan pelayanan berkelas dunia dengan menggunakan bahan dan produk lokal yang berkualitas.
- g. Pengembangan Teknologi. Dengan semakin kompleks dan tingginya tingkat persaingan dalam mendatangkan wisatawan ke suatu destinasi, kebutuhan akan teknologi tinggi khususnya teknologi industri akan mendorong destinasi pariwisata mengembangkan kemampuan penerapan teknologi terkini mereka. Pada daerah-daerah tersebut akan terjadi pengembangan teknologi maju dan tepat guna yang akan mampu memberikan dukungan bagi kegiatan ekonomi lainnya. Dengan demikian pembangunan kepariwisataan akan memberikan manfaat bagi masyarakat dan pemerintahan di berbagai daerah yang lebih luas dan bersifat fundamental. Kepariwisataan akan menjadi bagian tidak terpisahkan dari pembangunan suatu daerah dan

terintegrasi dalam kerangka peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.

Musaddun., et al., (2013) menjelaskan bahwa wilayah pesisir memiliki potensi lain berupa keunikan dan keindahan alam yang dapat menjadi daya tarik wisata sehingga aktivitas pariwisata dapat dikembangkan dan menghasilkan dampak positif dengan ikut meningkatkan perekonomian kawasan. Steven.R., et.al. (2013) menjelaskan bahwa pada sisi lain peningkatan keuntugan ekonomi sejalan dengan peningkatan pengunjung dan mendukung stabilitas keuangan untuk meningkatkan pengelolaan kapasitas manajemen. Oleh sebab itu pola tata ruang perlu didesain sedemikian rupa dalam upaya menarik pengunjung, sehingga diperlukan kontribusi setiap waktu dari para pengunjung demi kemajuan pariwisata, hal tersebut sejalan dengan pendapat Nahuelhual.et.al. (2013) menjelaskan bahwa penilaian tata ruang kunjungan merupakan karakteristik yang sangat diperlukan untuk mendapatkan informasi penting pada pengelolaan wisata melalui survey kepuasan (kuesioner dan wawancara). Selanjutnya Chan et.al., (2012) menjelaskan bahwa fakta lain identifikasi tata ruang menekankan pola kunjungan, evaluasi pariwisata berbasis alam, pada umumnya bergantung pada penilaian kuesioner atau wawancara dan pemamngku kepentingan.

2.3. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan pada era modern saat seperti ini semakin memiliki nilai strategis. Hal ini cukup penting, sebab diharapkan akan memunculkan ide-ide atau gagasan-gagasan yang inovatif, kreatif serta berwawasan ke depan bagi kemajuan hubungan yang lebih erat antara pemerintah dan masyarakat, sehingga diperoleh masukan-masukan bagi pengembangan serta peningkatan pemberdayaan masyarakat. Pitana (2006) menyebutkan bahwa untuk dapat meningkatkan partisipasi masyarakat maka sangat diperlukan program-program pembangunan atau inovasi yang dikembangkan mengandung unsur-unsur :

1. Memberikan keuntungan secara relative, terjangkau secara ekonomi dan ekonomis dinggap biaya yang dikeluarkan lebih kecil dari hasil yang diperoleh (*relative advantage*);
2. Unsur-unsur dari inovasi dianggap tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan kepercayaan setempat (*compatibility*);
3. Gagasan baru dan praktek baru yang dikomunikasikan dapat dengan mudah dipahami dan dipraktikkan (*complexity and practicability*); dan
4. Unsur inovasi tersebut mudah diobservasi hasilnya lewat demonstrasi atau paraktek peragaan (*observability*).

Pemberdayaan masyarakat sudah berada dalam posisi yang semakin penting sebab di era globalisasi ini sudah menjadi konsekuensi dari

terbukanya kebebasan berekspresi, sehingga masyarakat lebih kritis dan terbuka mengakaji serta mengkritisi kebijakan-kebijakan yang akan dan sedang dilakukan pemerintah. Dari kondisi tersebut, diharapkan timbulnya lembaga-lembaga usaha di tengah masyarakat dalam meningkatkan pendapatan yang lebih kreatif dan inovatif. Menurut Kit (2000), menyebutkan bahwa terdapat 4 tujuan yang diinginkan dengan berlakunya konsep pariwisata yang berbasis masyarakat, yaitu :

1. Pariwisata berbasis masyarakat harus berkontribusi untuk meningkatkan dan atau memperbaiki konservasi alam atau sumber daya budaya, termasuk keanekaragaman hayati.
2. Pariwisata berbasis masyarakat harus berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi lokal sehingga meningkatkan pendapatan dan keuntungan bagi masyarakat.
3. Pariwisata berbasis masyarakat harus melibatkan partisipasi masyarakat lokal.
4. Pariwisata berbasis masyarakat mempunyai tanggung-jawab kepada wisatawan
5. untuk memberikan produk yang peduli terhadap lingkungan alam, sosial maupun budaya.

Victor P.H. Nikijuluw (2001) menjelaskan bahwa kebutuhan lain yang selama ini tidak dipenuhi yaitu kurang dilibatkannya masyarakat pesisir dalam pembangunan. Keterlibatan yang dimaksud adalah keterlibatan secara total dalam semua aspek program pembangunan yang menyangkut diri mereka, yaitu sejak perencanaan program, pelaksanaannya, ecaluasinya, serta perelevansiannya. Dengan kata lain, kekurangan yang dimiliki selama ini yaitu tidak atau kurang partisipasi masyarakat dalam pembangunan diri mereka sendiri. Padahal partisipasi itu begitu perlu karena bagaimanapun juga, dan dengan dengan segala jenis upaya, tidak ada seorang miskinpun yang bisa keluar dari kemiskinan dengan bantuan orang lain, bila dia tidak membantu dirinya sendiri. Lebih lanjut dijelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah; 1) tersedianya dan terpenuhinya kebutuhan dasar, 2) Tersedianya prasarana dan sarana produksi secara lokal yang memungkinkan masyarakat dapat memperoleh dengan harga murah dan kualitas yang baik, 3) Meningkatnya peran kelembagaan masyarakat sebagai wadah aksi kolektif untuk mencapai tujuan-tujuan individu, 4) terciptanya kegiatan-kegiatan ekonomi produktif di daerah yang memiliki ciri-ciri berbasis sumberdaya lokal, memiliki pasar yang jelas, dilakukan secara berkelanjutan dengan memperhatikan kapasitas sumberdaya, 5) Terciptanya hubungan transportasi dan komunikasi sebagai basis atau dasar hubungan ekonomi antar kawasan pesisir serta antar pedalaman, 6) Terwujudnya

struktur ekonomi Indonesia yang berbasis pada kegiatan ekonomi di wilayah pesisir dan laut sebagai wujud pemanfaatan dan pendayagunaan sumberdaya alam laut. Terpeliharanya nilai-nilai tradisional di suatu desa merupakan salah satu daya tarik bagi wisatawan untuk tidak hanya berkunjung namun juga tinggal dalam jangka waktu yang cukup lama di desa tersebut. Tidak diragukan lagi hal ini akan menunjang proses *take and give* dari sisi budaya dan ekonomi. (Putra, 2008).

2.4. Pembangunan Pariwisata dan Pembangunan Ekonomi

Pariwisata merupakan salah satu industri terbesar, begitu kompleks dengan melibatkan banyak pihak dan aspek serta memiliki keuntungan yang luar biasa. Pengembangan kepariwisataan pada umumnya diarahkan sebagai sektor andalan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan daerah, memberdayakan perekonomian masyarakat, memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha, serta meningkatkan pengenalan dan pemasaran produk dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan sektor pariwisata menitikberatkan beberapa aspek, antara lain sosial budaya, ekonomi dan sebagainya. Hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan yang menyebutkan bahwa penyelenggaraan kepariwisataan ditujukan untuk meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan

kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah memperkenalkan dan mendayagunakan obyek dan daya tarik wisata di Indonesia serta memupuk rasa cinta tanah air dan mempererat persahabatan antar bangsa. Perkembangan pariwisata juga mendorong dan mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Wahab (1992) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan sarana kepariwisataan (*tourism superstructure*) adalah semua bentuk perusahaan yang dapat memberikan pelayanan pada wisatawan, baik secara langsung maupun tidak langsung dan hidup serta kehidupannya banyak tergantung kepada kedatangan wisatawan. Selanjutnya Pendit (1997), menjelaskan bahwa perusahaan utama yang langsung ini adalah semua perusahaan yang tujuan pelayanannya khusus diperuntukkan bagi perkembangan kepariwisataan dan kehidupannya benar-benar tergantung padanya. Terdapat tiga bagian yang penting dari sarana kepariwisataan, yaitu :

1. Sarana pokok kepariwisataan (*Main Tourism Superstructure*).
2. Sarana pelengkap kepariwisataan (*Supplementing Tourism Superstructure*).
3. Sarana penunjang kepariwisataan (*Supporting Tourism Super Structure*).

Oleh sebab itu dalam memenuhi kebutuhan pengunjung maka diperlukan investasi dalam bidang komunikasi, transportasi, perhotelan dan akomodasi lainnya, adanya industri kerajinan, industri makanan dan minuman, dan industri jasa lainnya. Sektor pembangunan pariwisata harus mampu mempertahankan posisi tawarnya dalam menarik wisatawan untuk berkunjung serta mempertahankan posisi bersaingnya dalam menarik potensi pasar wisatawan dalam artian memperbaiki citranya agar persepsi wisatawan terdorong untuk melakukan perjalanan wisata sebagai preferensi dalam menentukan pilihannya untuk berkunjung.

Selain potensi wisata peran sumber daya manusia juga sangat berpengaruh terhadap usaha perkembangan sektor wisata. Sumber daya manusia ini memegang peranan penting dalam menentukan berkembang atau tidaknya usaha perkembangan pariwisata disuatu daerah. Peran selanjutnya yang sangat penting adalah usaha promosi atau pemasaran yang terus menerus dilakukan. Hal ini sangat penting untuk dilakukan sebagai usaha mengenalkan produk wisata yang dimiliki suatu daerah kepada masyarakat luas. Perlunya pemasaran dengan memaksimalkan inovasi-inovasi promosi dimaksudkan supaya mampu memberi daya tarik terhadap produk wisata yang dipromosikan kepada masyarakat luas tersebut. Pemanfaatan teknologi informasi akan sangat membantu dalam mengenalkan potensi wisata kepada masyarakat luas dan mampu menarik investor untuk berinvestasi disuatu daerah wisata tersebut. Selain

perkembangan pariwisata pada suatu daerah, peran serta masyarakat dan dukungan pemerintah disuatu daerah terhadap sektor wisata memegang peranan yang sangat penting.

Pariwisata adalah suatu aktivitas yang kompleks yang dapat dipandang sebagai suatu sistem yang besar, yang mempunyai berbagai komponen seperti ekonomi, ekologi, politik, sosial, budaya dan seterusnya. Melihat pariwisata sebagai sebuah sistem, berarti analisis mengenai berbagai aspek kepariwisataan tidak bisa dilepaskan dari subsistem yang lain, seperti politik, sosial ekonomi, budaya dan seterusnya, dalam hubungan saling ketergantungan dan saling terkait (*interconnectedness*). Sebagai sebuah sistem, antar komponen dalam sistem tersebut terjadi hubungan interdependensi, yang berarti bahwa perubahan pada salah satu subsistem akan menyebabkan juga terjadinya perubahan pada subsistem yang lainnya, sampai akhirnya kembali ditemukan harmoni yang baru. I Putu Sudana (2013). Fennel (1999) menjelaskan bahwa pariwisata adalah sistem dari berbagai elemen yang tersusun seperti sarang laba-laba : “ *like a spider’s web- touch one part of it and reverberations will be felt throughout*”.

Dalam sistem pariwisata, ada banyak aktor yang berperan dalam menggerakkan sistem. Aktor tersebut adalah insan-insan pariwisata yang ada pada berbagai sektor. Secara umum, insan pariwisata dikelompokkan dalam tiga pilar utama, yaitu : (1) masyarakat, (2) swasta, dan (3)

pemerintah. Masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat umum yang ada pada destinasi, sebagai pemilik sah dari berbagai sumber daya yang merupakan modal pariwisata seperti kebudayaan. Dimasukkan kedalam kelompok masyarakat ini juga tokoh-tokoh masyarakat, intelektual, LSM, dan media masa. Selanjutnya dalam kelompok swasta adalah asosiasi usaha pariwisata dan para pengusaha, sedangkan kelompok pemerintah adalah pada berbagai wilayah administrasi, mulai dari pemerintah pusat, negara bagian, provinsi, kabupaten, dan seterusnya (Pitana dan Gayatri, 2005).

Tingkat kesiapan masyarakat yang harus dilakukan, antara lain adalah mengembangkan ekotourism yang berorientasi global sesuai kemajuan teknologi dengan membangun keunggulan kompetitif berdasarkan keunggulan daerah, keunggulan SDM, memperkuat kelembagaan, kesiapan sarana dan prasarana, meningkatkan kualitas pendidikan dan agama, budaya yang berorientasi pariwisata, serta melakukan kerjasama. Hal itu sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 17 Tahun 2016 (Bab IX Kerjasama Pasal 54) yang berbunyi “Badan Litbang Kemendagri, Badan Litbang Provinsi atau Lembaga dengan sebutan lainnya yang menyelenggarakan fungsi kemitraan serta Badan Litbang Kabupaten/Kota atau lembaga dengan sebutan lainnya yang menyelenggarakan fungsi kemitraan dapat bekerjasama dengan lembaga litbang, perguruan tinggi, dan lembaga lainnya.....”

Oleh sebab itu diperlukan kesiapan masyarakat akan kemajuan teknologi sebab dampak positif perkembangan IPTEK akan memberikan kemudahan-kemudahan kepada manusia dalam menjalankan segala aktivitasnya, mempermudah komunikasi tanpa jarak. Selain itu bertambahnya pengetahuan masyarakat dan wawasannya.

Dalam pembangunan destinasi pariwisata prioritas 2016-2019, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Investasi Pariwisata Kementerian Pariwisata, bagian ke dua Pembangunan Kepariwisata Nasional Peraturan Pemerintah No.50 Tahun 2011 tentang RIPPARNAS 2010-2025 disebutkan tentang destinasi pariwisata dan industri pariwisata dijelaskan dalam gambar sebagai berikut :

PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN NASIONAL
Peraturan Pemerintah No.50 Tahun 2011 tentang RIPPARNAS
2010-2025



Skema 3: Pembangunan Kepariwisataan Nasional

Selanjutnya dijelaskan bahwa pengembangan destinasi pariwisata adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan infrastruktur dan ekosistem pariwisata
2. Peningkatan kualitas dan kuantitas destinasi wisata budaya, alam, dan buatan
3. Tata kelola destinasi pariwisata di kawasan strategis pariwisata nasional
4. Pemberdayaan masyarakat
5. Profil dan promosi investasi pariwisata
6. Dukungan lintas sektor

Undang Undang No. 10/2009 tentang Kepariwisata menjelaskan bahwa pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah. Dalam hal ini industri pariwisata telah berlomba-lomba menciptakan suatu produk pariwisata yang lebih bervariasi menyangkut pelestarian dari daya tarik wisata itu sendiri sesuai dengan tujuan pengembangan pariwisata yaitu untuk mengenalkan keindahan alam, budaya dan adat istiadat yang beraneka ragam.

Daya tarik wisata juga disebut objek wisata merupakan potensi yang menjadi pendorong kehadiran wisatawan ke Bulukumba sehingga diperlukan sarana dan prasarana yang dapat menimbulkan rasa senang, dan nyaman. Untuk itu diperlukan kelayakan yang sifatnya komersil, misalnya kelayakan sosial ekonomi yang dapat menciptakan lapangan kerja dan kelayakan lingkungan dengan memanfaatkan sumberdaya alam.

Prasarana wisata seperti jalan, listrik, air, telekomunikasi, bank, rumah sakit, pusat-pusat pembelanjaan, sarana olahraga dan sebagainya dibangun dan disesuaikan dengan kondisi objek wisata yang pada gilirannya akan meningkatkan daya tarik wisata tersendiri.

Namun demikian, dalam pelaksanaan pembangunannya diperlukan koordinasi dengan pihak lain. Keberhasilan pengembangan pariwisata tidak hanya tergantung pada berapa banyak objek wisata yang dimiliki, keindahan, keunikan budaya masyarakat disekitar objek atau kawasan wisata

namun yang jauh lebih penting adalah SDM sebagai pengelola, sistem manajemen pengelolaan pariwisata dan informasi pariwisata itu sendiri. Sumber daya manusia yang berkualitas serta manajemen pengelolaan yang baik dan informasi pariwisata yang akurat, serta mudah diakses akan mampu mengembangkan potensi-potensi wisata menjadi lebih baik sehingga memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan penghasilan suatu daerah.

Selain pembangunan pariwisata yang dimaksud di atas, ilmu pembangunan ekonomi memegang peranan penting. Michael P. Todaro (2006) menjelaskan bahwa ilmu ekonomi pembangunan (*development economics*) memperhatikan masalah efisiensi alokasi sumber daya produktif yang langka (atau yang tidak terpakai) serta kesinambungan pertumbuhan dari waktu ke waktu, ilmu ekonomi pembangunan juga memberi perhatian pada mekanisme-mekanisme ekonomi, sosial, politik, dan kelembagaan, baik yang terkandung dalam sector swasta maupun yang terdapat di sector publik. Semua mekanisme itu sangat diperlukan demi terciptanya suatu perbaikan standar hidup secara cepat (paling tidak menurut standar historis) dan berskala luas bagi masyarakat. Lebih lanjut ditekankan bahwa pembangunan dan pertumbuhan dipisahkan. Pertumbuhan (*growth*) = peningkatan out-put. Pembangunan = usaha terpadu ke arah kesejahteraan. Pembangunan harus disertai pertumbuhan, pertumbuhan tidak harus disertai kesejahteraan. Redistribusi bukan pembangunan karena tidak ada pertumbuhan. Dalam arti

sempit : pembangunan adalah *historis monumental*, yaitu menitikberatkan ekonomi, orientasi pada GNP. Arti luas : *historis* = keamanan, sosbud, keadilan dan lain-lain.

1. Oleh sebab itu, ada beberapa macam strategi pembangunan di Indonesia yang perlu dicermati. Salah satu konsep penting yang perlu diperhatikan dalam mempelajari perekonomian suatu negara adalah mengetahui tentang strategi pembangunan ekonomi. Beberapa strategi pembangunan ekonomi yang dapat disampaikan adalah : (Sumber :(Digital // Books) Tahun Ajaran // Tingkat 1 Universitas Gunadarma.
2. Strategi Pertumbuhan. Adapun inti dari konsep strategi yang pertama ini adalah :
 - a. Strategi pembangunan ekonomi suatu negara akan terpusat pada upaya pembentukan modal, serta bagaimana menanamkannya secara seimbang, menyebar, terarah dan memusat, sehingga dapat menimbulkan efek pertumbuhan ekonomi.
 - b. Selanjutnya bahwa pertumbuhan ekonomi akan dinikmati oleh golongan lemah melalui proses merambat ke bawah (*trickle – down – effect*) pendistribusian kembali.

- c. Jika terjadi ketimpangan atau ketidakmerataan hal tersebut merupakan syarat terciptanya pertumbuhan ekonomi.
 - d. Kritik paling keras dari strategi yang pertama ini adalah bahwa pada kenyataan yang terjadi adalah ketimpangan yang semakin tajam.
3. Strategi pembangunan dengan pemerataan
- Inti dari konsep strategi ini adalah dengan ditekankannya peningkatan pembangunan melalui teknik sosial *engineering*, seperti halnya melalui penyusunan perencanaan induk, dan paket program terpadu.³ Strategi ketergantungan
- Tidak sempurnanya konsep strategi pertama dan kedua mendorong para ahli ekonomi mencari alternatif lain sehingga pada tahun 1965 muncul strategi pembangunan dengan nama *strategi ketergantungan*. Inti dari konsep strategi tergantung adalah :
- a. Kemiskinan di negara – negara berkembang lebih disebabkan karena adanya ketergantungan negara tersebut dari pihak / negara lainnya
 - b. Teori ketergantungan ini kemudian dikritik oleh Kothari dengan mengatakan “Teori ketergantungan tersebut memang cukup relevan namun sayangnya

telah menjadi semacam dalih terhadap kenyataan dari kurangnya usaha untuk membangun masyarakat sendiri (*Self Development*)

4. Strategi yang berwawasan ruang Strategi ini dikemukakan oleh Myrdall dan Hirschman, yang mengemukakan sebab – sebab kurang mampunya daerah miskin berkembang secepat daerah yang lebih kaya / maju. Menurut mereka kurang mampunya daerah miskin berkembang secepat daerah maju dikarenakan kemampuan / pengaruh menyeter dari kaya ke miskin (*Spread Effects*) lebih kecil daripada terjadinya aliran sumber daya dari daerah miskin ke daerah kaya (*Back-wash-effects*). Perbedaan pandangan kedua tokoh tersebut adalah, bahwa *Myrdall* tidak percaya bahwa keseimbangan daerah kaya dan miskin akan tercapai, sedangkan *Hirschman* percaya, sekalipun baru akan tercapai dalam jangka panjang.
5. Strategi Pendekatan kebutuhan pokok Sasaran dari strategi ini adalah menanggulangi kemiskinan secara masal. Strategi ini selanjutnya dikembangkan oleh *Organisasi Perburuhan Sedunia (ILO)* pada tahun 1975, dengan menekankan bahwa kebutuhan pokok manusia tidak mungkin dapat dipenuhi jika pendapatan masih rendah akibat

kemiskinan yang bersumber pada pengangguran. Oleh karena itu sebaiknya usaha-usaha diarahkan pada penciptaan lapangan kerja, peningkatan kebutuhan pokok dan sejenisnya.

Dengan demikian, perlunya formulasi strategi untuk melihat peluang dan tantangan dalam pembangunan pariwisata dan strategi pembangunan ekonomi. Formulasi strategis mencakup berbagai aktivitas analisis pemilihan strategis dalam pembangunan pariwisata yang didasarkan pada analisis posisi kawasan pariwisata dan pemilihan strategi dari analisis SWOT. Kriteria pemilihan strategi didasarkan pada lingkungan internal dan eksternal. Freddy Rangkuti, (2006) menyebutkan bahwa formulasi strategi yang biasanya disebut dengan perencanaan strategis merupakan proses penyusunan perencanaan jangka panjang, oleh karena itu prosesnya lebih banyak menggunakan proses Analisis SWOT adalah analisis yang mengidentifikasi berbagai faktor sistematis untuk merumuskan suatu strategi. Analisis ini didasarkan pada logika yang memaksimalkan kekuatan (*strengths*) dan peluang (*opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*weaknesses*) dan ancaman (*threats*). Metode ini digunakan untuk mengetahui masalah, kendala dan peluang dari daya tarik objek wisata, sarana dan prasarana, pelayanan, pengelolaan, serta pemasaran yang mendukung kegiatan.

- (1) Analisis penentuan komponen SWOT berdasarkan analisis data dan informasi dalam model kuantitatif perumusan strategi. Penggunaan metode- metode kuantitatif sangat dianjurkan untuk membuat peramalan (*forecasting*) dan asumsi- asumsi secara internal,
- (2) Analisis Faktor-Faktor Strategis Internal dan Eksternal (IFAS- EFAS). Pertama, penyusunan Tabel IFAS sebagai cara untuk menganalisis lingkungan internal (IFAS) untuk mengetahui berbagai kemungkinan kekuatan dan kelemahan. Kedua, penyusunan tabel EFAS sebagai cara untuk menganalisis lingkungan eksternal (EFAS) untuk mengetahui berbagai kemungkinan peluang dan ancaman. Dalam penyusunan kedua tabel tersebut dilakukan pembobotan (Scoring) dan Penilaian rating;
- (3) Analisis Matrik SWOT Matrik SWOT adalah yang menginteraksikan faktor strategis internal dan eksternal. Matrik ini dapat menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman (eksternal) yang dihadapi dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan (internal) yang dimiliki. Analisis ini akan menghasilkan 4 buah Alternatif Strategi SO, WO, ST, SW;

(4) Analisis Matrik *Space*. Matrik *space* adalah suatu dasar untuk mengetahui posisi pariwisata yang didapat dari nilai rating yang dimiliki oleh faktor-faktor strategisnya. Matrik *Space* digunakan untuk melihat garis vektor positif dan negatif untuk internal dan eksternal. Diagram posisi perkembangan pariwisata memberikan gambaran keadaan perkembangan pariwisata berdasarkan kuadran-kuadran yang dihasilkan garis vektor SW dan garis vektor OT, setiap kuadran memiliki rumusan strategis sebagai strategi utamanya. Rumusan setiap kuadran yang secara khusus untuk pariwisata dan beberapa pengertian yang melalui proses adaptasi dari penggunaan analisis SWOT untuk perusahaan, sehingga diadaptasi suatu rumusan sebagai berikut:

1. Kuadran I : *Growth* (pertumbuhan). (a) *Rapid Growth Strategi* (strategi pertumbuhan cepat); (b) *Stabe Growth Strategy* (strategi pertumbuhan stabil); (c) sampai turun).
2. Kuadran II : *Stability* (stabilitas), terbagi dua yaitu: (a) *Aggressive Maintenance Strategy* (strategi perbaikan agresif); (b) *Selective Maintenance Strategy* (strategi perbaikan pilihan).

3. Kuadran III : Survival (bertahan), (a) Turn Around strategy (strategi memutar balik); (b) Guirle strategy (strategi merubah fungsi).
4. Kuadran IV : Diversifikasi (penganekaragaman): (a) Strategi penganekaragaman melalui; (b) Integrasi horizontal; (c) Diversifikasi concentric strategy (strategi diversifikasi konsentrik) Diversifikasi conglomerate strategy (strategi diversifikasi konglomerat)

STRATEGI



Model Posisi Perkembangan Pariwisata
Sumber: LM-FELII (H Oka A. Yoeti :1996)

STRATEGI

BAB III **GAMBARAN PULAU** **BARRANG LOMPO**

Pulau Barrang Lompo masuk dalam Kecamatan Sangkarrang Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan. Kecamatan Sangkarrang adalah kecamatan yang tergolong baru dibentuk, dahulu masuk dalam Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar Luas Pulau barrang Lompo sebesar 19,23 Ha dan terletak di sebelah barat Kota Makassar. Jumlah penduduk mencapai

4.572 jiwa (2.359 pria dan 2.393 wanita) dari 1.270 kk (BPS Kota Makassar 2017). Saat ini Kelurahan Barrang Lompo memiliki 21 RT dan 4 RW dan dipimpin oleh lurah yang bernama Kurniati, SP. Pada sisi selatan pulau terdapat pantai yang berpasir putih dan selebihnya pulau ini dikelilingi oleh tanggul. Pengunjung dapat menggitari pulau dengan berjalan kaki selama 30 sampai dengan 45 menit. Luas habitat pesisir Pulau Barrang Lompo sekitar 130,57 ha, yang terdiri dari ekosistem terumbu karang seluas 71,72 ha dan ekosistem padang lamun seluas 58,85 ha. Kualitas tutupan karang hidup berkisar 50-75 %, sedangkan penutupan lamun sekitar 60 %.

Pulau Barrang Lompo berada di sebelah utara pulau Barrang Caddi, dan berjarak 13 km dari Kota Makassar. Konsentrasin pemukiman penduduk berada pada sisi Timur, Selatan dan Barat. Mayoritas penduduknya bekerja sebagai nelayan yang dilengkapi kurang lebih 50 buah kapal kayu motor. terdapat fasilitas pendidikan 1 buah taman kanak-kanak (TK) dan 2 buah sekolah dasar (SD), dan 1 buah puskesmas. Instalasi listrik dengan 2 buah generator yang berkapasitas 360 KVA yang beroperasi pada pukul 18.00-06.00 wita. Jalan-jalan utama dibuat dari paving blok, fasilitas air yang cukup serta memiliki 2 buah dermaga (tradisional dan semi permanen). Selain makam-makam tua dari abad XIX yang terdapat di pulau ini sebagai objek wisata budaya menarik dikunjungi.

Pulau Barrang Lompo terdapat kelompok pekerja keras, seperti pengrajin tangan dari hasil laut yang bernuansa seni dan unik telah dikenal

banyak orang jika berkunjung ke daerah tersebut, produk-produk yang dihasilkan antara lain: kerajinan tangan dari hasil laut berbagai olahan (hiasan dinding, asbak, alat isap rokok, hiasan pintu dan lain-lain). Bahan baku yang digunakan berasal dari berbagai macam dengan pemanfaatan laut sekitar daerah tersebut. Mulai dari kerang, mutiara, sisik penyu, tulang ikan dan berbagai macam biolata laut. Terdapat pula berbagai macam potensi yang dimiliki masyarakat Pulau Barrang Lompo, seperti kelompok pembuat kue tradisional dan penangkap ikan berbagai jenis.

Sejak tahun 1985 hasil-hasil produksi kerajinan tangan sudah digeluti akan tetapi belum dikenal luas . Usaha kerajinan tangan hasil laut tersebut hanya dikenal jika berkunjung ke pulau tersebut, oleh karena pelaku usaha tidak memiliki kemampuan di bidang manajemen pemasaran, bahkan tidak memiliki akses jika ada pameran-pameran dilaksanakan di Kota. Demikian pula pelaku usaha kue tradisional melakukan aktivitas sehari-hari dalam kondisi dan peralatan penunjang yang sangat sederhana, termasuk kelompok nelayan tangkap ikan yang kondisinya belum melakukan dipersifikasi pengolahan ikan, misalnya membuat abon dan sebagainya. Kondisi kehidupan masyarakat Pulau Barrang Lompo masih berada pada keadaan yang belum mampu dari segi ekonomi, sehingga kondisi kesehatan, tingkat pendidikan mempunyai keterbatasan dalam pembiayaan dan perlu mendapat perhatian semua pihak, khususnya pemerintah, dan perlunya kajian yang mendalam tentang potensi yang dimiliki Pulau Barrang Lompo.

Pengembangan obyek wisata Pulau Barrang Lompo Kecamatan Sangkarrang Kota Makassar melalui pemanfaatan potensi ekonomi dimaksudkan terciptanya masyarakat yang lebih maju, berkembang serta peningkatan usaha masyarakat menuju kesejahteraan dan perlunya dukungann kelembagaan. North (1993) adalah merupakan tokoh ekonomi kelembagaan baru (*new institutional economic*) yang memperoleh nobel ekonomi pada tahun 1993, kelembagaan adalah suatu pola hubungan dan tatanan antara anggota masyarakat atau organisasi yang saling mengikat, diwadahi dalam suatu jaringan atau organisasi, yang dapat menentukan bentuk hubungan antar manusia atau antara organisasi dengan ditentukan oleh faktor-faktor pembatas dan pengikat berupa norma, kode etik aturan formal dan non-formal untuk bekerjasama demi mencapai tujuan yang diinginkan. Pengembangan wisata diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berbasis ekonomi kreatif. Pengembangan wisata pada Pulau Barrang Lompo Kota Makassar diarahkan pada peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat yang berorientasi pada penataan objek wisata bahari Pulau Barrang Lompo. Data diperoleh melalui observasi, survey, dan dokumentasi, data dianalisis menggunakan regresi linier berganda. Pada kondisi lingkungan sosial budaya, aspek yang dinilai adalah tingkat partisipasi masyarakat mengelola lingkungan permukiman yang bersih dan nyaman, tingkat kesadaran masyarakat mengelola biolata laut, tingkat partisipasi masyarakat dalam penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan, dan

pengendalian lingkungan hidup, dan tingkat partisipasi masyarakat bersih pantai, termasuk pengelolaan sampah.



Gambar 3. Potret Kawasan Dermaga Pulau Barrang Lompo

Sebagai gambaran, pesisir pantai pulau Barrang Lompo terdapat bangunan-bangunan rumah penduduk yang belum tertatah dengan baik. Rumah penduduk bagian Timur pada umumnya menghadap ke Barat, artinya membelakangi laut sedangkan rumah bagian Barat menghadap ke Timur, dan belum tersedia MCK yang memadai, sehingga masyarakat masih sering memanfaatkan pinggir-pinggir pantai atau tanggul sebagai sarana MCK.



Gambar 4. Potret Kawasan Pulau Barrang Lompo

Melihat sifat alamiah wilayah pesisir Pulau Barrang Lompo dan aktivitas masyarakat pesisir yang dinamis dan kompleks, pengembangan wisata wilayah pesisir mengharuskan pendekatan secara terpadu dan optimal yang mencakup peran serta masyarakat di dalamnya, sehingga tidak terjadi ketimpangan dalam pengelolaannya. Moekidjat (2005) menyatakan bahwa pengembangan adalah perubahan yang dilakukan oleh seorang ataupun kelompok untuk mengarahkan pada perbaikan dan perubahan. Dengan demikian pengetahuan, kecakapan dan sikap merupakan hal penting oleh karena pesisir jika wilayah pesisir ditata dan dikelola dengan baik akan memberikan nilai dan manfaat dan daya tarik pengunjung. Musaddun., at al.,(2013) menjelaskan bahwa wilayah pesisir memiliki potensi lain berupa keunikan dan keindahan alam yang dapat menjadi daya tarik wisata sehingga aktivitas pariwisata dapat dikembangkan dan menghasilkan dampak positif dengan ikut meningkatkan perekonomian kawasan. Untuk itu perlu dilakukan peranserta masyarakat dalam pemanfaatan wilayah pesisir dalam pengelolaan wilayah pesisir serta merumuskan strategi pengembangan wisata, mulai dari perencanaan, implementasi dan pengendalian. Sedarmayanti (2014) menyebutkan bahwa manajemen sebagai proses yang terdiri dari rangkaian kegiatan, seperti perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian atau pengawasan, yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumber daya lainnya.

STRATEGI

BAB IV

PENGEMBANGAN WISATA PULAU BARRANG LOMPO

4.1. Kondisi Sosial Budaya Masyarakat Pulau Barrang Lompo

Pulau Barang Lompo adalah salah satu dari pulau-pulau koral di lepas pantai Kota Makassar yang berbatasan dengan Gusung Bone Battang. Di Pulau Barrang Lompo masih dijumpai tradisi yang dilakukan masyarakat seperti upacara mensucikan diri sebelum masuk memasuki bulan puasa, upacara Songkabala yaitu upacara untuk menolak bala yang akan datang, upacara Pa'rappo yakni upacara ritual yang dilaksanakan oleh para nelayan sebelum turun ke laut, upacara Karangan yakni upacara ritual yang dilakukan oleh para nelayan ketika pulang melaut dengan memperoleh hasil yang berlimpah. Hal tersebut merupakan suatu kearifan lokal yang perlu dilestarikan. Nababan, (2003) mengatakan bahwa masyarakat adat umumnya memiliki sistem pengetahuan dan pengelolaan lokal yang diwariskan dan ditumbuh-kembangkan terus-menerus secara turun temurun. Artinya masyarakat adat adalah mereka yang secara tradisional tergantung dan memiliki ikatan sosiokultural dan religius yang erat dengan lingkungan lokalnya yang terus menerus dilestarikan.



Fotret Peta Pulau Barrang Lompo

Potensi budaya yang dimiliki masyarakat di Pulau Barrang Lompo sangat menarik untuk dikembangkan sebagai salah satu daya tarik wisata, namun faktanya belum dikemas dengan baik. Barrang Lompo, sebuah pulau berjarak sekitar 9 mil di sebelah barat daratan Kota Makassar. Pulau ini dikenal sebagai salah satu tempat alternatif untuk belibur khususnya bagi warga kota karena jaraknya cukup dekat, akan tetapi berbagai jenis upacara-upacara tradisional yang dilakukan masyarakat Pulau Barrang Lompo belum dikenal luas, hanya masyarakat setempat yang memahami adanya tradisi tersebut. Karena wilayahnya berada di lingkungan pantai, sebagian besar bekerja sebagai nelayan. Sehari-hari masyarakat menggunakan bahasa Makassar, meskipun bahasa daerah lainnya juga sering digunakan.

Masyarakat setempat cukup familiar dan terbuka. Nampaknya, sikap tersebut menandakan mereka sudah terbiasa berinteraksi dengan para pengunjung dari luar pulau. Dengan adanya dukungan sumberdaya manusia masyarakat pesisir, sehingga diharapkan potensi yang dimiliki, khususnya budaya lokal dapat dikembangkan. Muhlis R (2017) menjelaskan bahwa sumberdaya yang dimiliki seyogyanya berfungsi untuk memajukan organisasi berdasarkan peran yang diberikan, untuk mencapai hal tersebut maka sumber daya manusia yang terlibat senantiasa mengembangkan dirinya melalui berbagai metode dan cara yang strategis agar potensi yang dimiliki daerah dapat dikenal luas, sehingga dapat memberi manfaat secara ekonomi.



Fotret Salah Satu Sudut Lingkungan di P.Barrang Lompo

Gambaran sosiokultural masyarakat di pulau Barrang Lompo seharusnya dikemas dalam paket wisata, tradisi yang dilakukan seharusnya

ditentukan jadwalnya setiap tahun sehingga penduduk setempat lebih siap mempersiapkan segala sesuatunya agar supaya lebih meriah. Jadwal tersebut selanjutnya disebar informasinya pada khalayak umum, termasuk dinas terkait supaya mendapat dukungan pelaksanaannya, termasuk di dalamnya pemberdayaan dan pengembangan masyarakat. Kegiatan budaya dengan mempertontonkan atraksi-atraksi merupakan salah satu daya tarik wisata. Purnama S. (2014) menjelaskan bahwa atraksi merupakan sesuatu yang berwujud, sedangkan daya tarik wisata adalah kekuatan/sifat yang dimiliki oleh atraksi yang dibuktikan dengan kedatangan wisatawan. Artinya daya tarik yang ada di Pulau Barrang Lompo memiliki aspek keunikan dan keindahan.



Area Salah Satu Mesjid di Pulau Barrang Lompo

Pengembangan masyarakat adalah salah satu upaya mengoptimalkan sumberdaya yang dimiliki untuk meningkatkan kapasitasnya, sekaligus meningkatkan taraf hidupnya yang lebih baik. Abu H. (2008) menekankan bahwa pengembangan masyarakat adalah serangkaian upaya untuk mendorong masyarakat agar lebih berdaya dalam meningkatkan sumberdaya manusia dan berusaha mengoptimalkan sumber daya tersebut sehingga dapat meningkatkan kapasitas dan kemampuannya dengan memanfaatkan potensi yang dimilikinya sekaligus dapat meningkatkan kemampuan ekonominya melalui kegiatan-kegiatan swadaya. Artinya bahwa dengan pemberdayaan masyarakat merupakan usaha untuk memandirikan kemampuan dirinya memanfaatkan potensi yang ada di wilayahnya. Muhlis R., (2017^b) menjelaskan bahwa sumber daya manusia yang ada didalam suatu organisasi seyogyanya berfungsi untuk memajukan organisasi berdasarkan peran yang diberikan, untuk mencapai hal tersebut maka sumber daya yang terlibat senantiasa mengembangkan dirinya melalui berbagai metode, keterampilan dan sikap.

4.2. Kondisi Ekonomi Masyarakat Pulau Barrang Lompo

Kondisi ekonomi masyarakat pulau Barrang Lompo belum menunjukkan peningkatan kesejahteraan. Mayoritas penduduknya bekerja sebagai nelayan, dilengkapi kurang lebih 50 buah kapal kayu motor dan

sekoci. Beberapa penduduk juga mencari tambahan penghasilan dengan cara menyewakan kapalnya sebagai alat transportasi antar pulau, menyewakan transportasi kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan musik untuk para pengunjung yang datang yang ingin berkeliling pulau dengan tarif yang bervariasi Rp.5.000-10.000, dan terdapat pula masyarakat membuat kerajinan tangan dengan menggunakan bahan-bahan yang tersedia di pulau, seperti kerang, tempurung kura-kura, dan akar pohon dijadikan gelang. Akan tetapi produksinya terbatas sebab listrik hanya menyala pada malam hari.



Gambar 6. Kapal Nelayan dan Usaha Ekonomi Masyarakat

Sebagian besar masyarakat Kelurahan Barrang Lompo bekerja sebagai nelayan dan dari data terlihat bahwa dari berbagai bidang pekerjaan yang digeluti masyarakat pulau ini terdapat masyarakat yang umumnya bekerja dari sektor nelayan dan lainnya bekerja pada sektor wiraswasta, perdagangan dan kerajinan. Sektor kerajinan tangan ini yang perlu dikembangkan sebab dapat dijadikan sebagai oleh-oleh jika pengunjung datang ke pulau Barrang Lompo, sehingga masyarakat sebagai pengrajin lebih meningkat pendapatannya. Hal inilah yang perlu dikembangkan sebagai bahagian dari pembangunan ekonomi. Herry Y. (2007), Sweeden (2008) menyatakan bahwa pemahaman ekonomi pesisir memberikan kontribusi ekonomi penting dari ekosistem untuk perekonomian karena beberapa alasan. Pertama, ekosistem pesisir yang sangat produktif dan memberikan kontribusi sejumlah besar nilai ekonomi terhadap perekonomian pesisir. Kedua, semua negara pada umumnya, dan ekonomi pesisir khususnya, memiliki sistem yang kompleks dari kepemilikan, pasar, organisasi produktif, dan pemerintah yang menentukan siapa yang menerima manfaat ekonomi dan yang membayar biaya produksi. Artinya bahwa program pembangunan di kawasan pesisir diarahkan pada pencegahan dan pengurangan angka kemiskinan yang terjadi di kalangan masyarakat pesisir. Kegiatan yang memungkinkan adalah meningkatkan peranan masyarakat, partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan serta campur tangan pemerintah.

Whindu P. (2018) menjelaskan bahwa konsep pembangunan yang paling mudah dan populer ialah kemakmuran. Kemakmuran ekonomi dihubungkan dengan taraf kehidupan yang lebih baik., terutama dari segi akumulasi modal dan kekayaan sebuah negara. Negara yang kaya raya dianggap sebagai negara yang makmur. Kemakmuran ekonomi sebuah negara dinilai dari segi pertumbuhan ekonomi yang dicapai dari masa ke masa. Kondisi sosial ekonomi masyarakat pulau Barrang Lompo menunjukkan bahwa data tentang pekerjaan pokok kepala keluarga berdasarkan hasil wawancara, diperoleh tanggapan bahwa jenis pekerjaan masyarakat Pulau Barrang Lompo adalah 70 % adalah nelayan, selebihnya sebagai pedagang, pengrajin hasil laut, tukang kayu, dan hanya 2% sebagai Pegawai Negeri Sipil. Masyarakat Kelurahan Barrang Lompo merupakan masyarakat pulau yang didominasi oleh masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan, akan tetapi fasilitas umum di pulau ini belum maju, terdapat transportasi reguler dari dan ke Makassar dengan kapal motor ataupun dengan menggunakan *speedboat*. Ketersediaan air belum optimal sebab masih banyak masyarakat yang membeli air pada tempat tertentu, terdapat pula fasilitas pendidikan dari sekolah TK hingga SMA. Pulau ini dilengkapi dengan fasilitas kesehatan berupa 1 buah puskesmas tenaga medis yang terdiri dari 1 orang dokter yang berkunjung 2-3 kali dalam seminggu, 1 orang perawat, 1 orang mantri, dan 1 orang bidan. Instalasi listrik dengan 2 generator yang berkapasitas 360 KVA yang beroperasi pada pukul 18.00 – 06.00 WITA. Jalan-jalan utama dibuat dari

paving blok namun sudah banyak yang rusak dan terdapat 1 buah dermaga semi permanen.

Aktivitas ekonomi di pulau Barrang Lompo belum menunjukkan kemajuan, disebabkan masih banyaknya kendala-kendala, seperti terbatasnya jadwal aliran listrik yang hanya menyala pada malam hari, demikian pula kegiatan ekonomi karena disebabkan belum ada ruang dalam bentuk pasar tradisional di lokasi pesisir pantai, masyarakat hanya memanfaatkan ruang di bawah kolong rumah masing-masing sebab umumnya masyarakat di pulau Barrang Lompo memiliki rumah panggung. Walau demikian, dermaga semi parnen kadangkala digunakan masyarakat melakukan aktivitas ekonomi dengan membuka café/warung kopi, menjual minuman dingin dan lain-lain sebagai bentuk hiburan sederhana bagi mereka hingga jam 11.00 malam.

Oleh sebab itu, perlunya sebuah sistem untuk mengatur proses berlangsungnya aktivitas yang berkesinambungan, dalam hal ini ada struktur yang mengatur pengelolaannya yang bersumber dari masyarakat dan pemerintah. Hal tersebut di atas, sebagaimana pendapat Teori fungsionalisme struktural oleh Talcott Parsons, (1951:5-6) yang diawali dengan empat skema penting mengenai fungsi untuk semua system tindakan, skema tersebut dikenal dengan sebutan skema AGIL. Menurut Parsons ada empat fungsi penting yang mutlak dibutuhkan bagi semua system sosial, meliputi : adaptasi (A), pencapaian tujuan atau goal attainment (G), integrasi (I), dan Latensi (L).

empat fungsi tersebut wajib dimiliki oleh semua system agar tetap bertahan (survive), untuk lebih jelasnya dijelaskan sebagai berikut:

1. *Adaptation*: fungsi yang amat penting disini system harus dapat beradaptasi dengan cara menanggulangi situasi eksternal yang gawat, dan system harus bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan juga dapat menyesuaikan lingkungan untuk kebutuhannya. Adaptasi dilaksanakan oleh organisme perilaku dengan cara melaksanakan fungsi adaptasi dengan cara menyesuaikan diri dan mengubah lingkungan eksternal.
2. *Goal attainment*; pencapaian tujuan sangat penting, dimana system harus bisa mendefinisikan dan mencapai tujuan utamanya. Fungsi pencapaian tujuan atau *Goal attainment* difungsikan oleh system kepribadian dengan menetapkan tujuan system dan memobilisasi sumber daya untuk mencapainya.
3. *Integrastion*: artinya sebuah system harus mampu mengatur dan menjaga antar hubungan bagian-bagian yang menjadi komponennya, selain itu mengatur dan mengelola ketiga fungsi (AGL).
4. *Latency*: laten berarti system harus mampu berfungsi sebagai pemelihara pola, sebuah system harus memelihara dan memperbaiki motivasi pola-pola individu dan *cultural*. Lalu bagaimanakah Parson menggunakan empat skema diatas, yakni;

dengan menyediakan aktor seperangkat norma dan nilai yang memotivasi aktor untuk bertindak.

Dalam hal ini, kelembagaan suatu daerah terdapat struktur yang berfungsi untuk melakukan tindakan dalam mencapai tujuan. Aspek kelembagaan (keorganisasian) berupa sesuatu yang lebih dinamis yaitu struktur, penetapan peran, tujuan, dan lain-lain. Dalam artian bahwa dalam sebuah struktur terdapat peran atau fungsi, aktivitas, hubungan antar peran, integrasi sosial, struktur umum yang merupakan sebuah sistem hubungan kegiatan dengan tujuan. Adaptasi merupakan cara terbaik dalam menyesuaikan diri, baik secara internal maupun eksternal (masyarakat), pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik jika semua sumberdaya yang terlibat dalam sebuah struktur saling beradaptasi dan bekerjasama berdasarkan fungsinya masing-masing dalam mengatur hubungan-hubungan satu dengan lainnya (integrasi), demikian pula organisasi harus melakukan adaptasi dengan lingkungan sekitarnya untuk mempermudah mencapai tujuan (*Goal attainment*) berdasarkan visi misinya dengan memperhatikan kultur dan norma yang berlaku (*latency*). Tingkat integrasi terjadi dengan dua cara, pertama : masing-masing tingkat yang paling bawah menyediakan kebutuhan kondisi maupun kekuatan yang dibutuhkan untuk tingkat atas. Sedangkan tingkat yang di atasnya berfungsi mengawasi dan mengendalikan tingkat yang ada dibawahnya. Muhlis R.(2017^a).

Parson memberikan jawaban atas masalah yang ada pada fungsionalisme structural dengan menjelaskan beberapa asumsi sebagai berikut;

1. System mempunyai *property* keteraturan dan bagian-bagian yang saling tergantung.
2. System cenderung bergerak kearah mempertahankan keteraturan diri atau keseimbangan.
3. System bergerak statis, artinya ia akan bergerak pada proses perubahan yang teratur.
4. Sifat dasar bagian suatu system akan mempengaruhi bagian-bagian lainnya.
5. System akan memelihara batas-batas dengan lingkungannya.
6. Alokasi dan integrasi merupakan dua hal penting yang dibutuhkan untuk memelihara keseimbangan system.
7. System cenderung menuju kerah pemeliharaan keseimbangan diri yang meliputi pemeliharaan batas dan pemeliharaan hubungan antara bagian-bagian dengan keseluruhan sistem, mengendalikan lingkungan yang berbeda dan mengendalikan kecenderungan untuk merubah system dari dalam.

Program pembangunan di kawasan pesisir diarahkan pada pencegahan dan pengurangan angka kemiskinan yang terjadi di kalangan masyarakat pesisir. Kegiatan yang mungkin dilakukan adalah meningkatkan peranan

lembaga-lembaga masyarakat yang berfungsi sebagai wadah partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan. Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir yang paling relevan adalah melalui penguatan kelembagaan. Muhlis R.(2017^a). Herry Yulistiyono (2007). Sweeden (2008) menyatakan pemahaman ekonomi pesisir memberikan kontribusi ekonomi penting dari ekosistem untuk perekonomian karena beberapa alasan. Pertama, ekosistem pesisir yang sangat produktif dan memberikan kontribusi sejumlah besar nilai ekonomi terhadap perekonomian pesisir. Kedua, semua negara pada umumnya, dan ekonomi pesisir khususnya, memiliki sistem yang kompleks dari kepemilikan, pasar, organisasi produktif, dan pemerintah yang menentukan siapa yang menerima manfaat ekonomi dan yang membayar biaya produksi.

Oleh karena itu, kelembagaan, merujuk kepada sesuatu yang bersifat strategis yang dinamis di dalam masyarakat. Kelembagaan adalah kelompok-kelompok sosial yang menjalankan aktivitasnya pada suatu masyarakat yang memiliki tujuan dan system tertentu, dan orang-orang yang terlibat di dalamnya memiliki pola perilaku tertentu serta nilai-nilai dan norma yang harus dilaksanakan. Dengan demikian masyarakat yang terlibat dalam kelembagaan merupakan kumpulan orang-orang yang satu sama lain berhubungan dan saling ketergantungan untuk mencapai tujuan, yakni kesejahteraan anggota.



STRATEGI

Sosialisasi Program Penelitian

BAB V

IMPLEMENTASI PENGEMBANGAN WISATA PULAU BARRANG LOMPO

5.1. Pengembangan Wisata Pulau Barrang Lompo

Tahapan implementasi ini, dilakukan melalui beberapa tahapan, yakni pada tahap pertama, yakni pra lapangan dilakukan penyusunan rancangan penelitian, kajian literatur yang berkaitan dengan strategi pengembangan objek wisata, penjadwalan penelitian, rancangan pengumpulan data, rancangan analisis data. Tahapan ke dua adalah pendalaman objek kajian, pengumpulan data dan membuat konsep-konsep yang berhubungan dengan tujuan penelitian. Dan tahapan akhir (ke tiga) adalah manajemen strategi penanganan objek wisata, kajian konsep dan rumusan strategi keberlanjutan penanganan kawasan wisata dari aspek fisik, ekonomi dan sosiokultural, model keberlanjutan penanganan daya tarik wisata berdasarkan kondisi Pulau Barrang Lompo, analisis keterkaitan objek wisata, dan pola penanganannya dan desain kawasan objek wisata yang diprioritaskan sebagai *pilot proyek* yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah kota Makassar dan masyarakat.

Sebagai gambaran bahwa jumlah wisatawan mancanegara (wisman) yang berkunjung melalui pintu masuk Makassar pada Juli 2017 naik sebesar

67,40 persen dibandingkan jumlah wisman pada Juni 2017. Jumlah Wisman pada bulan Juni 2017 adalah sebanyak 1.224 kunjungan sedangkan pada Juli 2017 sebanyak 2.049 kunjungan, dan tingkat hunian kamar hotel berbintang di Sulawesi Selatan pada Juli 2017 mencapai rata-rata 47,65 persen atau naik 5,72 poin dibandingkan dengan TPK Juni 2017 yang mencapai 41,93 persen. (BPS Provinsi Sulawesi Selatan, 2017).

Akan tetapi arus kunjungan wisatawan menurut data dan hasil penelitian menunjukkan bahwa wisatawan tersebut belum ada yang berkunjung ke Pulau Barrang Lompo, hal ini disebabkan karena pulau Barrang Lompo belum memiliki daya tarik wisata dan wisatawan belum mengenal pulau tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan dan daya tarik wisata pulau Barrang Lompo belum berjalan sejajar dengan pengembangan dan daya tarik wisata, antara lain seperti Benteng Fort Rotterdam, Pulau Kayangan, Pantai Losari, Pantai Akkarena, Pantai Tanjung Bayang, monument korban 40.000 jiwa di Kota Makassar. Artinya, pengembangan wisata Pulau Barrang Lompo belum dilaksanakan, dan belum terarah. Riska A., et al., (2009) menjelaskan bahwa kegiatan pariwisata pada dasarnya mencakup dua utama yaitu sediaan (*supply*) dan permintaan (*demand*). Komponen sediaan (*supply*) merupakan produk wisata yang dapat ditawarkan, meliputi obyek dan daya tarik wisata, sarana pariwisata, jasa pariwisata, serta prasarana dan sarana lingkungan. Sementara komponen permintaan (*demand*) mencakup keinginan serta aspirasi wisatawan dan

masyarakat di sekitar kawasan pariwisata. Fakta lapangan ditemukan bahwa pemanfaatan ruang kawasan pinggiran pesisir Pulau Barrang Lompo dominan belum berkembang sebagai daya tarik wisata. Jalur pesisir memanjang dan melingkar ini hanya terdapat rumah-rumah penduduk dan kapal-kapal nelayan, dan banyaknya sampah yang terlihat di sekitar pantai dan laut sehingga, proses tersebut berdampak pada kesemrautan fungsi-fungsi ruang kawasan secara fisik.

Dengan demikian diperlukan adanya kerjasama antara masyarakat dan pemerintah diperlukan dalam pengembangan wisata. Soebagyo. (2012) menekankan bahwa pengembangan pariwisata yang telah dilakukan, baik oleh pemerintah maupun swasta telah meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan dari suatu daerah lain. Kunjungan wisatawan akan merangsang interaksi sosial dengan penduduk di sekitar tempat wisata dan merangsang tanggapan masyarakat sekitarnya sesuai dengan kemampuan mereka dalam beradaptasi, baik di bidang perekonomian, kemasyarakatan maupun kebudayaan mereka. Artinya paket-paket wisata perlu dikemas sebagai komponen-komponen yang harus diperhatikan dalam pengembangan wisata. Pengembangan penelitian yang menghasilkan kemajuan jika dibarengi dengan pemanfaatannya bagi peningkatan kelestarian dan pemeliharaan lingkungan akan lebih membawa kemajuan kehidupan daerah. Kegiatan pengembangan penelitian menghasilkan data dan informasi yang bermanfaat

untuk pelestarian fungsi dan kemampuan lingkungan hidup dan sumber daya alam melalui kajian-kajian.



Suyitno, (2006) menyebutkan bahwa komponen wisata meliputi hal-hal berikut;

- (a) Sarana Transportasi,
- (b) Sarana Akomodasi,
- (c) Sarana makan dan minum (Restoran),
- (d) objek dan atraksi wisata,
- (e) Sarana Hiburan (*Entertainment and amusement*),
- (f) Toko Cenderamata (*Souvenir Shop*), dan
- (g) Pramuwisata dan pengatur wisata (*Guide and Tour Manager*).

5.2. Isu strategis dan Konsep Penanganan Obyek Wisata Pulau Barrang Lompo

Isu strategi pada prinsipnya berkaitan dengan persoalan kebijakan pelaksanaan, penentuan tujuan yang hendak dicapai, dan penentuan cara atau metode penggunaan sarana dan prasarana. Strategi selalu berkaitan dengan sarana, dan cara, oleh karena itu, strategi juga harus didukung oleh kemampuan untuk mengantisipasi kesempatan yang ada. Dalam melaksanakan fungsi dan peranannya dalam pengembangan pariwisata daerah, pemerintah daerah bersama masyarakat harus melakukan berbagai upaya dalam pengembangan sarana dan prasarana pariwisata sebab berkaitan dengan daya tarik secara global sehingga dapat memberi manfaat pada masyarakat dari berbagai sektor. Untuk itu diperlukan berbagai upaya memperkenalkannya, hal itu sejalan dengan pernyataan Kelly.,et.al., (2010) menjelaskan bahwa pariwisata adalah sebuah kesejahteraan secara global jika terfokus dan mengembangkan peluang melalui penyediaan produk dan mempromosikannya. Bagi para wisatawan, diantaranya adalah nilai pendidikan dan hiburan seperti rasa kesejahteraan dan meningkatkan kesadaran lingkungan. Ballantyne, Packer, & Falk, 2011; Curtin, 2009).

Pariwisata adalah suatu rangkaian kegiatan yang berhubungan dengan gerakan manusia yang melakukan perjalanan atau persinggahan sementara dari tempat tinggalnya, ke suatu tempat tujuan di luar lingkungan

tempat tinggal yang didorong oleh beberapa kebutuhan dan keinginan. Oleh sebab itu konsep pariwisata merupakan salah satu sektor penggerak perekonomian yang perlu diberi perhatian agar dapat berkembang dengan baik. Salah satu pendekatan pengembangan wisata alternatif adalah pulau wisata untuk pembangunan yang berkelanjutan dalam bidang pariwisata. Dengan demikian pulau wisata adalah sebuah kawasan yang memiliki beberapa karakteristik khusus untuk menjadi daerah tujuan wisata. Di kawasan tersebut dibutuhkan penduduknya masih memiliki tradisi dan budaya yang relatif masih asli, makanan khas, sistem sosial kultural mewarnai sebuah kawasan wisata, selain itu diperlukan lingkungan yang masih asli dan terjaga merupakan salah satu faktor terpenting dari sebuah kawasan tujuan wisata. Pentingnya sumber daya pariwisata dan organisasi pariwisata menarik dalam menciptakan hasil positif seperti layanan kepuasan atau kesetiaan. Grissemann.,at.al.,(2012)

5.3. Kebijakan Pemda

Kebijakan pembangunan Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019 ditetapkan dengan memperhatikan 3 dimensi pembangunan nasional, yakni Sumber Daya Manusia, sektor unggulan, dan kewilayahan. Sektor Kelautan dan Perikanan telah dijadikan sektor unggulan nasional yang penjabarannya dilaksanakan oleh KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) dengan pendekatan fusi atau bisnis dari hulu sampai hilir, peran KKP yang

dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan serta tugas KKP dalam agenda pembangunan nasional. Kebijakan Pokok, yakni menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang bertanggung jawab, berdaya saing dan berkelanjutan, dilaksanakan dengan strategi dan langkah-langkah operasional adalah mengoptimalkan pemanfaatan ruang laut dan pesisir. Langkah operasional yang dilakukan adalah; a) perencanaan ruang laut nasional dan kawasan strategis, b) pengaturan pemanfaatan ruang laut dan pesisir, dan c) pengaturan jasa kelautan (wisata bahari, BMKT, dan lain-lain)

Dalam revisi RPJPD Kota Makassar telah dilakukan penyesuaian dengan Permendagri 54 Tahun 2010. (1) Perumusan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah untuk masing-masing misi dalam bentuk uraian sasaran pokok beserta indikator dan target kinerjanya pada tahun 2025 serta rumusan arah kebijakan jangka panjang untuk mencapai sasaran pokok tersebut dalam kurun waktu 20 tahun. (2) Perumusan tahapan dan prioritas pembangunan daerah untuk setiap tahapan lima tahunan bagi setiap periode RPJMD sesuai masa jabatan walikota. Dalam perumusan tahapan dan prioritas ini diuraikan sasaran pokok yang diprioritaskan pada setiap tahapan lima tahun serta penekanan arah kebijakan yang berlaku pada tahapan lima tahun tersebut. Sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah untuk masing-masing misi rumusan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah Kota Makassar untuk

setiap misi adalah 1) Mengembangkan kultur maritim dan memanfaatkan sumberdaya laut secara optimal dan berkelanjutan. Sasaran pokok yang ingin dicapai melalui misi ini adalah: Meningkatnya kapasitas infrastruktur kemaritiman, sarana dan prasarana perkotaan kawasan pesisir, dan pemanfaatan sumberdaya perikanan dan pulau-pulau. Arah kebijakan pembangunan jangka panjang untuk mencapai sasaran pokok tersebut Pengembangan dukungan infrastruktur kemaritiman; pengelolaan berkelanjutan potensi perikanan; serta pengembangan dan rehabilitasi kawasan strategis koridor pesisir melalui kawasan reklamasi kota untuk berkembangnya *water front city*, 2) Memberdayakan kekuatan ekonomi masyarakat dan menguatkan daya saing ekonomi kota. Dalam menjalankan misi ini ada dua sasaran pokok yang hendak dicapai. Sasaran pokok yang pertama adalah meningkatnya kesejahteraan masyarakat berbasis daya saing perdagangan dan jasa, , pengembangan pusat-pusat perniagaan dan fasilitas pendukung perdagangan, jasa dan pariwisata, pengembangan UKM dan penguatan perusahaan daerah, serta pemantapan iklim investasi. Sasaran pokok yang kedua adalah terlindunginya golongan masyarakat lapis bawah dari kerentanan sosial dan ekonomi. Arah kebijakan pembangunan jangka panjang dalam mencapai sasaran pokok ini adalah penanggulangan kemiskinan dan penanganan PMKS secara terpadu melalui penanganan sektor informal perkotaan, pemberian jaminan sosial keluarga, dan peningkatan keterampilan anggota keluarga kurang mampu, 3) meningkatkan kualitas

hidup masyarakat secara layak dan bermanfaat. Misi ini juga mencakupi dua sasaran pokok untuk pencapaiannya. Pertama, meningkatnya derajat pendidikan masyarakat. Arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah untuk mencapai sasaran pokok ini adalah peningkatan dan pemerataan akses layanan pendidikan melalui kerangka pendidikan gratis, peningkatan kualitas layanan pendidikan, dan pengembangan fasilitas pendukung bagi Makassar sebagai kota tujuan pendidikan. Kedua, Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Arah kebijakan pembangunan jangka panjang untuk mencapai sasaran pokok ini adalah peningkatan dan pemerataan akses dan jangkauan layanan kesehatan, peningkatan kualitas layanan kesehatan, dan dukungan sarana serta fasilitas bagi pola hidup bersih dan sehat dalam masyarakat, 4) Memantapkan dan memanfaatkan ruang dan lingkungan hidup yang nyaman, tertib dan berkesinambungan Sasaran pokok yang hendak dicapai melalui misi ini adalah meningkatnya kualitas lingkungan hidup dalam menjamin kehidupan kota yang nyaman. Kebijakan pembangunan untuk mencapai sasaran pokok tersebut diarahkan pada perwujudan lingkungan hidup yang bersih dan terkendali dari pencemaran, penguatan kerangka legal dan konsistensi penataan ruang, serta penanganan kebersihan dan keindahan kota berbasis ruang terbuka hijau, penataan lorong serta penanganan sampah secara terpadu. Sasaran pokok kedua dalam menjalankan misi ini adalah terpeliharanya ketertiban dan ketenteraman dalam menjamin kehidupan kota yang nyaman. Arah kebijakan pembangunan untuk sasaran pokok ini adalah

peningkatan stabilitas keamanan dan pemeliharaan ketertiban umum berbasis partisipasi masyarakat dan penegakan hukum, 5) Mengembangkan manajemen pembangunan kota yang berbudaya dan berwawasan masa depan. Sasaran pokok dalam menjalankan misi ini adalah berkembangnya infrastruktur dan fasilitas kota yang mendorong literasi warga kota dalam wawasan masa depan. Arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah untuk mencapai sasaran pokok ini adalah peningkatan kapasitas serta jangkauan infrastruktur dan fasilitas kota dengan jenis dan kualitas yang terus berkembang sesuai dinamika global, 6) Meningkatkan apresiasi budaya, agama, penegakan hukum dan kepedulian terhadap lingkungan. Sasaran pokok yang hendak dicapai dalam menjalankan misi ini adalah berkembangnya apresiasi budaya, kehidupan beragama dan harmoni sosial dalam kehidupan kemasyarakatan. Arah kebijakan pembangunan jangka panjang untuk mencapai sasaran pokok ini adalah pemeliharaan kehidupan beragama sebagai landasan moral masyarakat, apresiasi budaya dan kearifan lokal, dan penguatan harmoni sosial berbasis kemajemukan masyarakat.

Periode 2020-2025 merupakan tahapan RPJMD Kota Makassar. Pada tahap ini secara umum kebijakan pembangunan daerah berfokus pada pematangan dan akselerasi yang didorong untuk pencapaian target-target kinerja yang telah dicanangkan, dengan asumsi bahwa perubahan-perubahan yang didorong pada keempat periode lima tahunan sebelumnya untuk percepatan penyelesaian masing masing sasaran yang telah ditetapkan. Pada

tahapan lima tahu keempat ini kondisi yang hendak diwujudkan adalah masyarakat Kota Makassar yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui akselerasi pembangunan pada berbagai bidang sehingga tercapai struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif yang didukung oleh SDM berkualitas tinggi. Pada tahapan ini, identitas sebagai kota maritim, niaga, pendidikan dan jasa yang berorientasi global, berwawasan lingkungan dan bersahabat diharapkan memanifestasikan kehidupan masyarakat yang mandiri, maju, adil dan makmur tersebut. Upaya pokok untuk mewujudkan kondisi tersebut adalah: 1) Memantapkan kesejahteraan masyarakat berkelanjutan, adil dan merata dengan berbasis pada identitas sebagai kota maritim, kota pendidikan, kota niaga dan jasa dan berwawasan lingkungan; 2) Memantapkan pelayanan public pada berbagai urusan pemerintahan yang memuaskan seluruh lapisan dan golongan masyarakat; 3) Memantapkan daya saing daerah dalam perwujudan sebagai kota dunia dengan berbasis pada kemajuan sains dan teknologi serta budaya masyarakat; 4) Memantapkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik. Indikator dan target kinerja sasaran pokok yang diprioritaskan pencapaiannya pada tahap ini adalah indikator yang terkait dengan arah kebijakan tersebut. Namun demikian, sasaran pokok lain yang target kinerjanya untuk tahun terakhir RPJPD (2025) juga diperhatikan agar seluruh sasaran pokok dapat dipastikan pencapaiannya.

Dalam konsep kebijakan pariwisata, ada banyak aktor yang berperan dalam menggerakkan sistem. Aktor tersebut adalah insan-insan pariwisata yang ada pada berbagai sektor. Secara umum, insan pariwisata dikelompokkan dalam tiga pilar utama, yaitu : (1) masyarakat, (2) swasta, dan (3) pemerintah. Masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat umum yang ada pada destinasi, sebagai pemilik sah dari berbagai sumber daya yang merupakan modal pariwisata seperti kebudayaan. Dimasukkan kedalam kelompok masyarakat ini juga tokoh-tokoh masyarakat, intelektual, LSM, dan media masa. Selanjutnya dalam kelompok swasta adalah asosiasi usaha pariwisata dan para pengusaha, sedangkan kelompok pemerintah adalah pada berbagai wilayah administrasi, mulai dari pemerintah pusat, negara bagian, provinsi, kabupaten, dan seterusnya.

5.4. Implementasi Strategi Pengembangan

Pentingnya faktor, seperti partisipasi wisatawan baik lokal maupun mancanegara mempelajari kerampilan, motivasi, lingkungan dan kesempatan berinteraksi sosial sebagai sumber daya yang dibutuhkan untuk menciptakan nilai pelanggan secara efektif. Anker T.B.et.,al (2015). Suatu penelitian yang dilakukan oleh Stephen J.P.,et.,al.,(2017) mengidentifikasi

konsep baru bahwa gerakan menawarkan potensi bagi pemangku kepentingan pengusaha pariwisata, konsumen, karyawan, masyarakat sebagai tuan rumah merupakan peluang mengembangkan keunggulan kompetitif dalam pembangunan pasar pariwisata, atribut alam pantai dan hubungannya dengan cara hidup sehat.

Alam pantai banyak memiliki keuntugan yang dapat dimanfaatkan dengan baik terkait pengunjung, sehingga dapat menarik penduduk menemukan kembali pantai sebagai era baru yang berbeda dengan masa lalu. Fokus penelitian tersebut menyoroti bagaimana pariwisata perlu mencari fokus baru untuk mengembangkan daya tarik pengunjung dari interkoneksi tempat tinggal yang sehat, komsumsi yang sehat dan rekreasi. Diartikan fokus pada konsumen individu dan kebutuhan mereka untuk membantu menyegarkan pasar yang besar terhadap daur hidup produk menjadi tema utama secara global. Dengan berfokus pada kesempatan kalaborasi tersebut telah tercapai akan mempertahankan peluang wirausaha terkait dengan segmen pasar baru dan terkait dengan kesejahteraan. Studi pentingnya teknologi informasi sebagai sumber daya yang digunakan oleh pemangku kepentingan untuk menciptakan nilai jaringan di bidang pariwisata. Cabbidu., et.,al.,(2013). Operasi pelanggan dan sumber daya biasanya menjelajahi dan

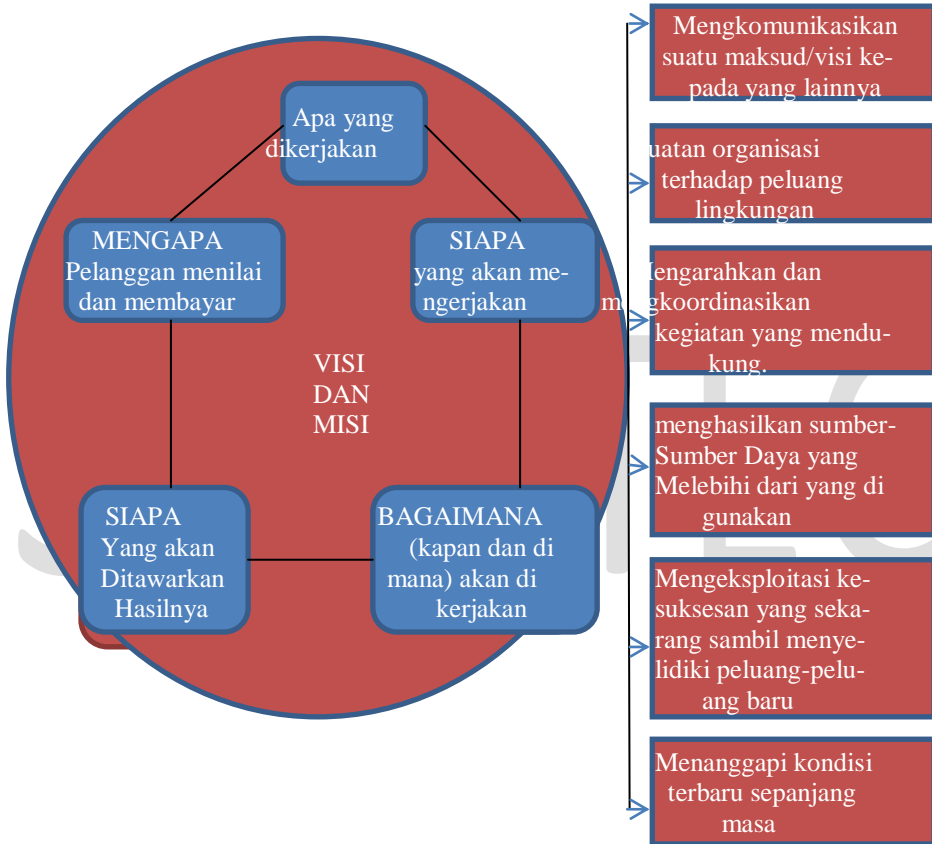
menggunakan pendekatan berorientasi tujuan sebagai sarana untuk mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan nilai pelanggan. Prebensen.,et.,al.,(2013).

Strategi dirumuskan sebagai suatu tujuan yang ingin dicapai, upaya untuk mengkomunikasikan apa saja yang akan dikerjakan, oleh siapa yang mengerjakannya, bagaimana cara mengerjakannya, serta kepada siapa saja hal-hal tersebut pula dikomunikasikan. Suatu Strategi terdiri dari suatu kumpulan pilihan yang terintegrasi dan perlu disadari bahwa pilihan tersebut tentu dapat menjangkau atau memenuhi pilihan yang dianggap penting dari suatu hal yang dihadapi. Fungsi dan strategi pada dasarnya adalah berupaya agar strategi yang disusun dapat diimplementasikan secara efektif. Untuk itu terdapat enam fungsi yang harus dilakukan secara simultan yaitu (Sofjan A. (2016) :

1. Mengkomunikasikan suatu maksud (visi) yang ingin dicapai kepada orang lain,
2. Menghubungkan atau mengaitkan kekuatan atau keunggulan dengan peluang dari lingkungannya
3. Memanfaatkan atau mengeksploitasi keberhasilan dan kesuksesan yang didapat sekarang, sekaligus menyelidiki adanya peluang-peluang baru
4. Menghasilkan dan membangkitkan sumber-sumber daya yang lebih banyak dari yang digunakan sekarang

5. Mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan atau aktivitas ke depan
6. Menanggapi serta bereaksi atas keadaan yang baru dihadapi sepanjang waktu.

Ke enam fungsi di atas dapat diilustrasikan pada gambar di bawah di mana dapat diidentifikasi untuk memudahkan strategi tersebut direalisasikan. Dari fungsi strategi tersebut tentang siapa yang mengerjakannya, bagaimana cara mengerjakannya, serta kepada siapa saja hal-hal tersebut pula dikomunikasikan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat gambar sebagai berikut :



Skema : Inflementasi Strategi, Sofjan Assauri

Kaitan dengan hal tersebut, maka strategi pengembangan pariwisata dalam implikasi secara langsung terkait dengan pengembangan wisata Pulau Barrang Lompo, yaitu;

- a. Kurangnya pergerakan transportasi laut yang tersedia, sehingga arus kunjungan terbatas, kapal laut hanya melayani penumpang regular dari jam 7.00 pagi hingga jam 12.00 siang. Sore hingga malam hari tidak beroperasi,
- b. Keterbatasan ruang untuk penyediaan aktivitas ekonomi,
- c. Keterbatasan promosi adanya budaya masyarakat yang masih dilaksanakan secara tradisional, dan
- d. Infrastruktur lain yang masih terbatas. Keempat hal tersebut memiliki pengaruh secara signifikan terhadap perkembangan wisata terhadap wilayah Pulau Barrang Lompo.

Strategi yang diusulkan untuk penanganan pengembangan wisata berbasis ekonomi Pulau Barrang Lompo, yaitu;

1. Mengembangkan fungsi transportasi laut, dalam hal ini menambah efektivitasnya jadwal beroperasinya kapal-kapal. Upaya ini dilakukan untuk menarik arus kunjungan ke Pulau Barrang Lompo. Artinya pengunjung tidak harus tinggal menunggu jadwal kapal esok harinya,
2. Mengembangkan dan menata ulang kawasan pinggiran pesisir Pulau Barrang Lompo. Hal ini dilakukan melalui regulasi yang baik melalui pemberian izin mendirikan bangunan di sepanjang pantai dan usaha-usaha komersil, baik masyarakat setempat atau pihak swasta yang akan mengembangkan usaha, dan dalam artian bahwa

kerjasama antara masyarakat dan pemerintah mengembangkan objek wisata,

3. Mengembangkan informasi-informasi yang menarik secara lokal, nasional bahkan internasional tentang keberadaan dan daya tarik wisata yang dimiliki Pulau Barrang Lompo. Usaha ini dilakukan melalui pembuatan brosur-brosur yang menarik dan selanjutnya dipromosikan melalui dinas terkait, kantor-kantor, tempat-tempat objek wisata lain dan melalui internet, dan
4. Mengembangkan serta menata infrastruktur untuk mempermudah akses pengunjung ke Pulau Barrang Lompo, termasuk penanganan sampah. Upaya ini diwujudkan melalui penyediaan dermaga yang lebih baik, penyediaan penginapan, restoran dan akses jalan yang baik dan bersih serta penyediaan kantong-kantong sampah.



Sosialisasi Peran Masyarakat terhadap Ekowisata

Pada kondisi lingkungan sosial budaya, aspek yang dinilai adalah tingkat partisipasi masyarakat mengelola lingkungan permukiman yang bersih dan nyaman, tingkat kesadaran masyarakat mengelola biolata laut, tingkat partisipasi masyarakat dalam penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup, dan tingkat partisipasi masyarakat bersih pantai, termasuk pengelolaan sampah.



Fotret Kegiatan Religius Masyarakat P.Barrang Lompo

Pengembangan dan implementasi wisata pulau Barrang Lompo adalah memberikan manfaat bagi pengembangan studi tata kelola dari sisi teori pengembangan strategi ilmu manajemen berdasarkan perspektif fisik, ekonomi dan sosiokultural, sebagai aspek penting dalam penyelesaian penanganan objek wisata yang pada gilirannya dapat menambah kesejahteraan masyarakat yang secara khusus terkait dengan penanganan kawasan strategis daya tarik wisata.



Fotret Pengrajin Hasil Laut

Pengrajin tangan hasil laut dalam keberadaannya selama ini, hanya terpaku pada usaha membuat saja tanpa adanya pesanan dan hanya dipajang untuk menunggu pembeli, begitupun yang terjadi pada pembuat kue-kue tradisional dan juga terdapat pada kelompok-kelompok nelayan tangkap. Kelompok tersebut hanya menangkap lalu dijual, belum berpikir kreatif dalam mengolah hasil tangkapan dalam bentuk lain. Peluang-peluang usaha yang terdapat di Pulau Barrang Lompo cukup menjanjikan sebab bahan baku cukup banyak tersedia, oleh sebab itu pemberdayaan pelaku usaha perlu dikembangkan melalui partisipasi dan peningkatan produksi, pelaksanaan pelatihan kegiatan usaha, pelaksanaan promosi, dan tata kelola kelembagaan. Untuk itu dengan adanya kajian ini akan bekerjasama dengan kelompok-kelompok masyarakat di Pulau Barrang Lompo akan membantu menyelesaikan masalah. Pemberdayaan masyarakat tersebut diharapkan

dapat meningkatkan pendapatan dan terbukanya lapangan kerja bagi masyarakat untuk pembiayaan kebutuhan keluarga.

Indikator target dan capaian pemberdayaan masyarakat di Pulau Barrang Lompo Kecamatan Sangkarrang berdasarkan komponen pencapaian pada kondisi ekonomi rumah tangga di Pulau Barrang Lompo, tingkat ekonomi rumah tangga masyarakat dalam kategori masih rendah dalam pendapatan. Untuk itu diperlukan pendampingan diversifikasi dan peningkatan produksi dalam pengembangan usaha dan peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam menunjang ekonominya. Dalam perkembangan usaha nampak bahwa produksinya kurang meningkat, akses pemasaran belum optimal, kelembagaannya belum optimal, sehingga diperlukan strategi menumbuh kembangkan usaha masyarakat Pulau Barrang Lompo, perluasan pemasaran serta terbukanya lapangan kerja dan terbentuknya perbaikan sistem pengelolaan kelembagaan usaha. Kualitas sumber daya manusia (SDM) ditinjau dari aspek keterampilan pelaku usaha masih terbatas sebab hanya mengandalkan pengalaman masa lalu dan berlangsung terus-menerus. Windhu P. (2018) menjelaskan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah faktor Sumber Daya Manusia (SDM). SDM merupakan faktor penting dalam proses pembangunan, cepat lambatnya proses pembangunan tergantung kepada sejauh mana sumber daya manusia selaku subjek pembangunan memiliki kompetensi yang memadai untuk melaksanakan pembangunan dengan

membangun infrastruktur di daerah-daerah, termasuk pengelolaan sumber daya alam (SDA). Oleh sebab itu perlunya SDM untuk mengikuti pelatihan-pelatihan kewirausahaan, agar supaya bertambahnya wawasan berusaha untuk mengembangkan diri.

Hubungan kemasyarakatan kaitannya dengan komunikasi antar masyarakat lainnya kurang efektif. Untuk itu, dengan melibatkan partisipasi masyarakat serta melibatkan dalam mempromosikan potensi Pulau Barrang Lompo kepada pengunjung dan membagikan brosur-brosur produk lebih luas maka pada gilirannya masyarakat akan terbiasa berkomunikasi. Perlunya pemahaman masyarakat tentang arti pentingnya pemberdayaan dan pemahaman tentang wirausaha agar masyarakat memiliki wawasan berusaha, sehingga masyarakat memiliki kreativitas atau inovasi. Kreativitas merupakan kemampuan seseorang dalam membuat sesuatu menjadi baru dalam keberadaannya. Kreativitas juga berhubungan dengan adanya ide para pelaku usaha. Menurut Bygrave (2006) Wirausahawan adalah orang yang memperoleh peluang dan menciptakan suatu organisasi untuk mengejar peluang itu, proses kewirausahaan meliputi semua fungsi, aktivitas, dan tindakan yang berhubungan dengan perolehan peluang dan penciptaan organisasi untuk mengejarnya.



Fotret Salah Satu Hasil Kerajinan Tangan

Nimran (1999) mendefinisikan kepribadian sebagai keseluruhan cara bagaimana individu bereaksi dan berinteraksi dengan orang lain. Proses interaksi antara individu dapat menunjukkan tingkah laku mereka. Oleh sebab itu, jika seseorang memiliki jiwa kewirausahaan dan mengaplikasikannya dimana mereka berada maka tentu saja akan berhubungan dengan pembangunan daerahnya, hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Sjafrizal, (2014) bahwa semua itu diperlukan untuk dapat meningkatkan proses pembangunan daerah dan sekaligus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Untuk itu diharapkan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam upaya penanganan pariwisata ditinjau dari aspek fisik, ekonomi dan sosiokultural sesuai amanat Undang Undang Republik Indonesia No 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata bahwa kepariwisataan merupakan integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana terpadu, berkelanjutan dan bertanggung jawab dengan tetap

memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional. Bahwa pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global, sehingga memberi gambaran empirik strategi penanganan objek wisata secara fisik, ekonomi dan sosiokultural, memberikan gambaran dan model keberlanjutan penanganan daya tarik wisata oleh pemerintah secara nasional untuk memenuhi sasaran dan target pemenuhan *Sustainable Development* dan mengembangkan pendekatan yang mengakomodasi karakteristik fisik, ekonomi dan sosiokultural dalam penanganan pariwisata.

Pada kondisi lingkungan sosial budaya, aspek yang dinilai adalah tingkat partisipasi masyarakat mengelola lingkungan permukiman yang bersih dan nyaman, tingkat kesadaran masyarakat mengelola biolata laut, tingkat partisipasi masyarakat dalam penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup, dan tingkat partisipasi masyarakat bersih pantai, termasuk pengelolaan sampah. Dari 270 responden masyarakat di Pulau Barrang Lompo tersebut, setelah dianalisis diperoleh pengaruh 0,4 artinya bahwa lingkungan sosial dan budaya memiliki pengaruh terhadap keberlanjutan penanganan wisata bahari di Pulau Barrang Lompo. Pada aspek potensi ekonomi dari 270 responden dengan indikator pengembangan ekonomi dan industri, perkembangan infrastruktur,

perkembangan tingkat pendidikan dan akses teknologi serta peningkatan pendapatan masyarakat dan kesejahteraan memiliki pengaruh 0,8, artinya bahwa pengaruhnya signifikan sangat kuat terhadap keberlanjutan penanganan wisata bahari di Pulau Barrang Lompo.

Faktor-faktor penghambat/kendala pembangunan destinasi wisata, antara lain: 1) fasilitas akomodasi yang tersedia masih terbatas terutama klasifikasi hotel dengan fasilitas dan pelayanan, 2) Fasilitas dan pelayanan WC/Kamar Mandi Komunal, 3) fasilitas publik/ruang terbuka hijau, dan 4) tidak tersedianya fasilitas persampahan. Dan yang tidak kalah pentingnya dalam perencanaan wisata bahari yang berkelanjutan adalah fasilitas dermaga yang representatif serta titik pemecah ombak. Oleh sebab itu diperlukan desain kawasan strategis dalam menjawab tantangan dan kendala dalam penegelolaan obyek wisata. Di bawah ini adalah peta konsep pengembangan kawasan Pulau Barrang Lompo;



Gambar 1. Peta Pengembangan Kawasan Pulau Barrang Lompo

Peta di atas menunjukkan konsep pengembangan kawasan pulau Barrang Lompo, pada konsep tersebut disiapkan pemecah ombak vegetatif,

perencanaan dermaga, perencanaan wc dan kamar mandi komunal dan perencanaan ruang publik. Untuk rencana pemecah ombak mekanik dan perencanaan dermaga akan didesain pada tahap selanjutnya.

Kualitas lingkungan yang buruk masih menjadi salah satu permasalahan yang terjadi di Pulau Barrang Lompo, salah satu penyebabnya adalah kebiasaan masyarakat yang masih melakukan proses MCK di sembarang tempat, oleh karena itu MCK komunal menjadi salah satu alternatif untuk mengatasi permasalahan lingkungan yang terjadi di kawasan Pulau Barrang Lompo. Kehadiran MCK Komunal nantinya diharapkan mampu mengubah kebiasaan dan kehidupan warga setempat. Warga yang biasanya buang air besar (BAB) di sembarang tempat, kini punya tempat yang lebih representative dan lebih pribadi untuk melakukan kegiatan tersebut, selain itu limbah dari MCK juga dapat diolah menjadi biogas untuk memasak. Titik peletakan MCK komunal di Pulau Barrang Lompo dapat dilihat pada peta di bawah ini yang ditandai dengan warna orange.



Gambar 2. Perencanaan Titik Perletakan WC/KM. Komunal

Selanjutnya kata sampah bukanlah hal yang baru bagi kita, jika kita mendengar kata ini pasti terlintas di benak kita sampah adalah semacam kotoran, setumpuk limbah, sekumpulan berbagai macam benda yang telah dibuang ataupun sejenisnya yang menimbulkan bau busuk yang menyengat hidung, persampahan juga merupakan salah satu masalah klasik yang masih

dihadapi oleh masyarakat di Pulau Barrang Lompo.

Permasalahan sampah ini diakibatkan oleh masih belum adanya fasilitas pengolahan sampah mandiri dalam kawasan pulau Barrang Lompo, sehingga sangat dirasa perlu untuk merencanakan fasilitas tersebut hadir di Pulau Barrang Lompo.



Gambar 3. Perencanaan Titik Persampahan

Gambar peta di atas menunjukkan area fasilitas yang nantinya diharapkan menjadi pemicu bagi masyarakat untuk lebih peduli dalam mengolah sampahnya menjadi lebih bermanfaat serta dapat menjadi kebersihan di Pulau Barrang Lompo. Sebagian besar masyarakat memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai daya yang bisa dimanfaatkan. Paradigma pengelolaan sampah kumpul, buang dan angkut, justru dapat memberi beban berat ke tempat pembuangan akhir (TPA). Untuk mencapai pengelolaan persampahan yang optimal sudah waktunya ada perubahan paradigma upaya optimalisasi pengelolaan sampah.

Untuk mencapai kondisi masyarakat yang hidup sehat dan sejahtera di masa yang akan datang, akan sangat diperlukan adanya lingkungan yang sehat. Dari aspek persampahan, maka kata sehat akan berarti sebagai kondisi yang akan dapat dicapai bila sampah dapat dikelola secara baik sehingga bersih dari lingkungan dimana manusia beraktifitas didalamnya. Pengelolaan sampah dalam hubungannya dengan kelestarian lingkungan pada hakekatnya merupakan masalah yang memerlukan suatu pemecahan secara bijaksana agar diperoleh hasil yang optimal dan menguntungkan bagi semua pihak.

Pada sisi lain ruang terbuka publik yang hijau menjadi penting dihadirkan disebabkan fungsinya yang bukan saja sebagai fungsi ekologis, mempercantik kota tapi hal tersebut menunjukkan identitas suatu daerah atau kota dan juga merupakan kebahagiaan masyarakat kota (*cityzen*). Hal itulah yang perlu dihadirkan ada di Pulau Barrang Lompo, hal ini didasarkan pada

sebuah realitas bahwa masyarakat membutuhkan tempat untuk bertemu, berkomunikasi, bertukar pikiran (*brainstorming*), santai, saling belajar satu sama lain melakukan aktifitas individu dan aktifitas komunal. Hal tersebut akan terjadi apabila didukung dengan ruang terbuka publik yang memadai.



Gambar 4. Perencanaan Ruang Terbuka Publik/Hijau

Peta di atas menunjukkan bahwa secara institusional penyediaan ruang

terbuka publik di Pulau Barrang Lompo dapat difasilitasi oleh pemerintah Kota Makassar. Proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 % dari luas wilayah. Selanjutnya dibagi proporsinya paling sedikit ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota 20 % dan ruang terbuka hijau privat adalah 10 %.

STRATEGI

Daftar Pustaka

- _____, 2009. UU No.10 Tentang Kepariwisata
- _____, (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
- , Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) di Kota Makassar Tahun 2005-2025
- Anker T.B., Sparks, I. Moutinho, I., & Grønroos, 2015; Grønroos & Gummerus, 2014). Consumer Dominant Value Creation. *European Journal Of Marketing*, 49 (3/4), 532e560
- Arthur Sullivan, Steven M. Sheffrin. 2003. *Economic: Principles in Action*. Upper Saddle River, New Jersey 07458: Pearson Prentice Hall. p. 471. ISBN 0-13-083085-3
- Adisasmita, Rahardjo. 2013. *Pembangunan Kawasan dan Tata Ruang*. Edisi Pertama-Yogyakarta: Graha Ilmu
- Biro Pusat Statistik, 2016. *Statistik Makassar Dalam Angka*,
- Bygrave, William D, 2006 *The Portable MBA Entrepreneurship Terjemahan Dyah Ratna Permatasari*. Binaputra Aksara, Jakarta.
- Cabiddu, F., Lui, T.-W., & Piccoli, G. (2013). *Managing value co-creation in the tourism industry*. *Annals of Tourism Research*, 42, 86e107.
- Chan, K. M. A., Satterfield, T., & Goldstein, J. (2012). *Rethinking ecosystem services to better address and navigate cultural values*. *Ecological Economics*, 74, 8–18.
- David, Fred R. 2009. *Manajemen Strategis*. –Jakarta: Salemba Empat

- Edi Purwo Saputro, Ahmad Mardalis, Dkk. 2007. **Karakteristik Dan Orientasi Strategi Pengembangan Manajemen Kepariwisata Di Jawa Tengah.** Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah.
- Fissi Novitasari. 2015. Manfaat dan Tujuan Pariwisata. Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. *Jurnal Nasional Pariwisata, ISSN 1411-9862. Vol. 6, No.1, April 2014*
- Fannel, D. 1999. *Ecotourism : An Introduction.* London: Routledge.
- Faulkner, Bill. 1997. *Makalah Perkembangan Pariwisata di Indonesia: Perspektif Gambaran Besar.* Penerbit: ITB, Bandung.
- Freddy Rangkuti. 2006. Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Grissemann, U. S., & Stokburger-Sauer, N. E. (2012). Customer co-creation of travel services: The role of company support and customer satisfaction with the co-creation performance. *Tourism Management, 33(6), 1483e1492.*
- Hunger, J David. 2003. *Manajemen Strategi.* Diterjemahkan oleh; Agung; Ed.II.- Yogyakarta: Andi. ISBN 979-731-098-1
- I Putu Sudana. 2013. Analisis Pariwisata. Fakultas Pariwisata Universitas Udayana, Denpasar. *Jurnal Vol.13 No.1: ISSN 1410-3729*
- Kelly, C. (2010). Analyzing Wellness Tourism Provision: A Retre at Operators Study. *Journal of Hospitality and Tourism Management. 17 (No.1). 108e116 Mar 2010.*
- M.Anshar Amran, 2008. *Citra Quickbrid. Pulau Barrang Lompo.*
- Muhammad Roem, 2017. *Harian Saudagar, Disparekraf Akan Dorong Pengembangan Wisata Pesisir, Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi, 20 Juli.*

- Muhlis Ruslan. 2017^a. Pengaruh Sehat Kelembagaan Koperasi Terhadap Kesejahteraan Anggota (Studi pada Masyarakat Pesisir di Sulawesi Selatan). Disertasi
- Muhlis Ruslan, 2017^b. The Influence of Healthy Financial, Business, and Human Resource Competence toward the Performance of Cooperation Institution: A Study on the People Living in the Coastal Area in Makassar. *International Review of Management and Marketing*. Vol 7. ISSN: 2146-4405. available at <http://www.econjournals.com>
- Musaddun., at al.,(2013). Bentuk Pengembangan Pariwisata Pesisir Berkelanjutan di Kabupaten Pekalongan. *Jurnal Ruang*. Vol.1 Nomor 2. ISSN 1858-3881
- Michael P.Todaro, Stephen C.Smith. 2006. *Pembangunan Ekonomi/Edisi Kesembilan*, jilid I. Penerbit Erlangga.
- Nahuelhual, L., Carmona, A., Lozada, P., Jaramillo, A., & Aguayo, M. (2013). Mapping recreation and ecotourism as a cultural ecosystem service: An application at the local level in southern Chile. *Applied Geography*, 40, 71–82.
- Nimran, Umar,1999, *Perilaku Organisasi*.Citra Media, Surabaya
- Oda I.B Haryanto.2017. Membangun Karakter Sadar Wisata Masyarakat di Destinasi Melalui Kearifan Lokal Sunda *Jurnal Vol.4 No.1*.
- Purnama Suzanti. 2014. Daya Tarik Pacu Jawi Sebagai Atraksi Wisata Budaya Di Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat 1. *Jurnal Nasional Pariwisata, ISSN 1411-9862.Vol. 6, No.1, April 2014*
- Prasiasa, Putu Oka (2012). *Destinasi pariwisata, berbasis masyarakat*, Jakarta : Salemba Empat
- Prebensen, N. K., Vittersø, J., & Dahl, T. I. (2013). Value co-creation significance of tourist resources. *Annals of Tourism Research*, 42(0), 240e261.

- Putra, Windhu. 2018. Perekonomian Indonesia Penerapan Beberapa Teori Ekonomi Pembangunan di Indonesia. Ed.1, Cet. 1.-Depok: Rajawali Pers.
- Pitana I Gde dan Gayatri Putu G. 2005. Sosiologi Pariwisata. Yogyakarta: Andi Offset.
- Pitana, I Gde. 2006. Kepariwisata Bali dalam Wacana Otonomi daerah. Jakarta: Puslitbang kepariwisataan.
- Pendit, Nyoman S. 1997. Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana. Jakarta: PT. Pradnya Paramita
- Sjafrizal, 2014. Ekonomi Wilayah dan Perkotaan. Ed.1-2,-Jakarta: Rajawali Pers.
- Sjahfrizal. 2014. Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi. Jakarta: Rajawali Pers.
- Steven, R., Castley, J. G., & Buckley, R. (2013). Tourism revenue as a conservation tool for threatened birds in protected areas. PLoS One, 8(5), e62598.
- Sofjan Assauri. 2016. Strategi Management: Sustainable Competitive Advantages.—Ed.. 2,—Jakarta: RajawaliPers.
- Stephen J. Page, Heather Hartwell, Nick Johns, Alan Fyall, Adele Ladkin, Ann Hemingway, (2017). Case study: Wellness, tourism and small business development in a UK coastal resort: Public engagement in practice. Tourism Management journal homepage: www.elsevier.com/locate/tourman
- Victor P.H. Niki Juluw Aspek Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir Dan Strategi Pemberdayaan Mereka Dalam Konteks Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Secara Terpadu. Direktorat Jenderal Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Departemen Kelautan dan Perikanan-RI

Wahab, Salah. 1992. Manajemen Kepariwisataaan. Yakarta : Pradnya Paramita.

_____, 2017. Foto Fakultas Ilmu Kelautan UNHAS

http://www.academia.edu/8290344/definisi_pariwisata_dari_beberapa_ahli

<http://pariwisatadanteknologi.blogspot.com/2010/06/produk-pariwisata-tourism-product.html>

<https://id.scribd.com/doc/137323183/Defenisi-Pemasaran-Pariwisata-Oleh-Beberapa-Ahli-Yaitu>

<https://www.slideshare.net/Rafaellamadea/manajemen-pariwisata-dan-biro-perjalanan-wisata>https://id.wikipedia.org/wiki/Manajemen_strategis

<http://sangkararang.com/kelurahan/barrang-lompo/>

<http://makassar.tribunnews.com/2017/10/02/agustus-2017-jumlah-wisatawan-mancanegara-ke-makassar-turun>

<http://makassar.tribunnews.com/2017/12/07/jumlah-wisman-sulsel-anjlok-1095-wisatawan-malaysia-terbanyak>

<http://www.ppk-kp3k.kkp.go.id/ver2/news/read/73/bedah-pulau-di-barrang-lompo.html>

http://id.wikipedia.org/wiki/Desa_wisata.

<http://haris14.wordpress.com/2011/05/15/macam-%E2%80%93-macam-strategi-pembangunan-indonesia/>